



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
BPTD Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah
Tahun 2025**

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	Dikonsep	Taufiq Dwi Putranto	Penelaah Teknis Kebijakan	15 – 04 – 2025	
2	Diperiksa	Tri Widiatno Kartanto	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	16 – 04 – 2025	
3	Disetujui	Akhmad Yasin Maulana	Plt. Kepala Bagian Tata Usaha	17 – 04 – 2025	
		Dhany Farizi	Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan	17 – 04 – 2025	
		Budi Suryo Utomo	Plt. Kepala Bidang Sarana dan Angkutan	17 – 04 – 2025	
		Budi Santoso	Plt. Kepala Bidang Prasarana	17 – 04 – 2025	



• **KATA**

PENGANTAR

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Perhubungan tentunya termasuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan amanat yang tertera dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Monitoring Capaian Kinerja yang mewajibkan setiap instansi pemerintah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang serta telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan dari Peraturan-Peraturan tersebut, maka Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menyajikan gambaran secara

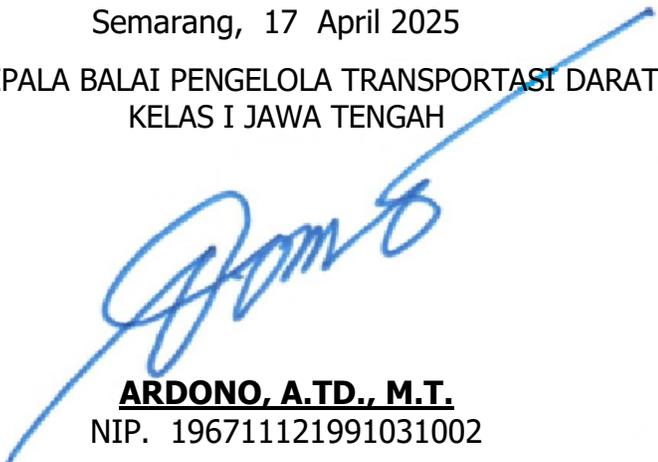
transparan mengenai pencapaian kinerja dibandingkan dengan target pada revisi terakhir, dikaitkan dengan upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah masih ada kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah guna meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah.

Semarang, 17 April 2025

Pt. KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS I JAWA TENGAH



ARDONO, A.T.D., M.T.

NIP. 196711121991031002



• RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2025 merupakan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi untuk membantu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025.

Sebagai pelaksanaan kegiatan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini terdapat 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Kegiatan, dimana 4 (empat) indikator kinerja kegiatan capaian kinerjanya lebih atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan capaian kinerjanya kurang dari 100% ($IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi 10,13% (target 100%);
2. IKK 1.3 Jumlah terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi 18 Lokasi (target 18 Lokasi);
3. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi 0 Lokasi (target 1 Lokasi);
4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 9 Lokasi (target 9 Lokasi);

5. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A terealisasi 0% (target 55%);
6. IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal Tipe A terealisasi 55% (target 55%);
7. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi 0% (target 12%);
8. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 18,44% (target 19,17%);
9. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 6,93% (target 9%);
10. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 Orang (target 250 Orang);
11. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat teralisasi dengan nilai 72,39 (target nilai 89);
12. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi dengan nilai 88,51 (target nilai 90).

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target Revisi I Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja BPTD Kelas I Jawa Tengah maka diperoleh data Capaian Kinerja pada BPTD Kelas I Jawa Tengah adalah sebesar **67,72%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh Sasaran Kegiatan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah akan meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	8
BAB I PENDAHULUAN	9
I.1. Latar Belakang	9
I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja.....	9
I.3. Sumber Daya Manusia	14
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	16
I.5. Sistematika Laporan.....	18
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	25
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	33
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	33
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	34
II.3 Realisasi Anggaran.....	93
BAB III PENUTUP.....	156
III.1 Penutup.....	156
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	158

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Kelas I Jawa Tengah	9
Tabel 1.2 Jumlah ASN Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025	14
Tabel 1.3 Rencana Strategis BPTD Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029	25
Tabel 1.4 Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	27
Tabel 1.5 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025.....	29
Tabel 1.6 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025.....	31
Tabel 2.1 Target, realisasi dan capaian IKK dan SK Triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	37
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	38
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.....	41
Tabel 2.5 Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi.....	43
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	46
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.....	49
Tabel 2.8 Daftar Satuan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025	51
Tabel 2.9 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	54
Tabel 2.10 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A.....	54
Tabel 2.11 Daftar Nilai SPM Terminal Tipe A Tahun 2025.....	57
Tabel 2.12 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	59
Tabel 2.13 Hasil Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2025	63
Tabel 2.14 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.....	65
Tabel 2.15 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	69
Tabel 2.16 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	69

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	74
Tabel 2.18 Daftar Satuan Pelayanan UPPKB yang ada di wilayah BPTD Kelas I.....	77
Tabel 2.19 Daftar Rekapitulasi Data Pelanggaran UPPKB sampai dengan Triwulan I.....	78
Tabel 2.20 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	80
Tabel 2.21 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	83
Tabel 2.22 Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	84
Tabel 2.23 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel.....	89
Tabel 2.24 Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	89
Tabel 2.25 Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025.....	93
Tabel 2.26 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025.....	93
Tabel 2.27 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025.....	94
Tabel 2.28 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	95
Tabel 2.29 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025.....	95
Tabel 2.30 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	95
Tabel 2.31 Rincian Revisi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	96
Tabel 2.32 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	97
Tabel 2.33 Rincian Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2025.....	97
Tabel 2.34 Rincian Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025.....	98
Tabel 2.35 Rincian Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	99
Tabel 2.36 Rincian Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025.....	99
Tabel 2.37 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.....	100
Tabel 2.38 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM.....	101
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi.....	158

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas I.....	13
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Tengah	14
Gambar 2.1	Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	39
Gambar 2.2	Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	42
Gambar 2.2	Grafik Capaian IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	47
Gambar 2.4	Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.....	50
Gambar 2.5	Grafik Capaian IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A.....	55
Gambar 2.6	Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A.....	60
Gambar 2.7	Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	66
Gambar 2.8	Grafik Capaian IKK 3.1 persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	71
Gambar 2.9	Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	76
Gambar 2.10	Grafik Capaian IKK 3.5 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	81
Gambar 2.11	Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	85
Gambar 2.12	Grafik Capaian IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	90

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2025

Lampiran 4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025

Lampiran 5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2025

Lampiran 6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025

Lampiran 7. SK Manual IKK Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat pada tanggal 2 Januari 2025, BPTD Kelas II Jawa Tengah resmi menjadi BPTD Kelas I Jawa Tengah. Hal ini ditindaklanjuti dengan penunjukan pelaksana tugas untuk Kepala Balai beserta jajaran pejabat struktural di bawahnya pada tanggal 7 Januari 2025 oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah mempunyai kedudukan tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Kelas I Jawa Tengah

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 6 TAHUN 2023
1	Kedudukan BPTD Kelas I Jawa Tengah	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 6 TAHUN 2023
		berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala.
2	Tugas BPTD Kelas I Jawa Tengah	Melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
3	Fungsi yang dilaksanakan BPTD Kelas I Jawa Tengah	<p>a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;</p> <p>c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;</p> <p>e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan</p> <p>f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan</p> <p>g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</p>

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

BPTD Kelas I Jawa Tengah mempunyai wilayah kerja, sebagai berikut:

- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Wilayah : 34.337 km²

- Panjang Jalan Nasional : 1.581,30 km
- Jumlah Ruas Jalan Nasional : 261 ruas
- Pelabuhan SDP : 9 lokasi
 - 1) Pelabuhan Penyeberangan Kendal
 - 2) Pelabuhan Penyeberangan Jepara
 - 3) Pelabuhan Sungai Sleko
 - 4) Pelabuhan Danau Cacaban
 - 5) Pelabuhan Sungai Jipang
 - 6) Pelabuhan Danau Gajahmungkur
 - 7) Pelabuhan Danau Kedungombo
 - 8) Pelabuhan Danau Rawa Pening
 - 9) Pelabuhan Danau Wadas Lintang
- UPPKB : 14 lokasi
 - 1) UPPKB Subah
 - 2) UPPKB Banyudono
 - 3) UPPKB Tanjung
 - 4) UPPKB Wanareja
 - 5) UPPKB Ajibarang
 - 6) UPPKB Sarang
 - 7) UPPKB Klepu
 - 8) UPPKB Toyogo
 - 9) UPPKB Gubug
 - 10) UPPKB Selogiri
 - 11) UPPKB Pringsurat
 - 12) UPPKB Salam
 - 13) UPPKB Sambong
 - 14) UPPKB Lebuawu
- Terminal Tipe A : 18 lokasi
 - 1) TTA Mangkang

- 2) TTA Bawen
- 3) TTA Tingkir
- 4) TTA Pekalongan
- 5) TTA Pemalang
- 6) TTA Jati Kudus
- 7) TTA Tidar
- 8) TTA Cepu
- 9) TTA Kebumen
- 10) TTA Giri Adipura
- 11) TTA Purworejo
- 12) TTA Bobotsari
- 13) TTA Mendolo
- 14) TTA Ir Soekarno
- 15) TTA BMD Cilacap
- 16) TTA Tegal
- 17) TTA Bulupitu
- 18) TTA Demak

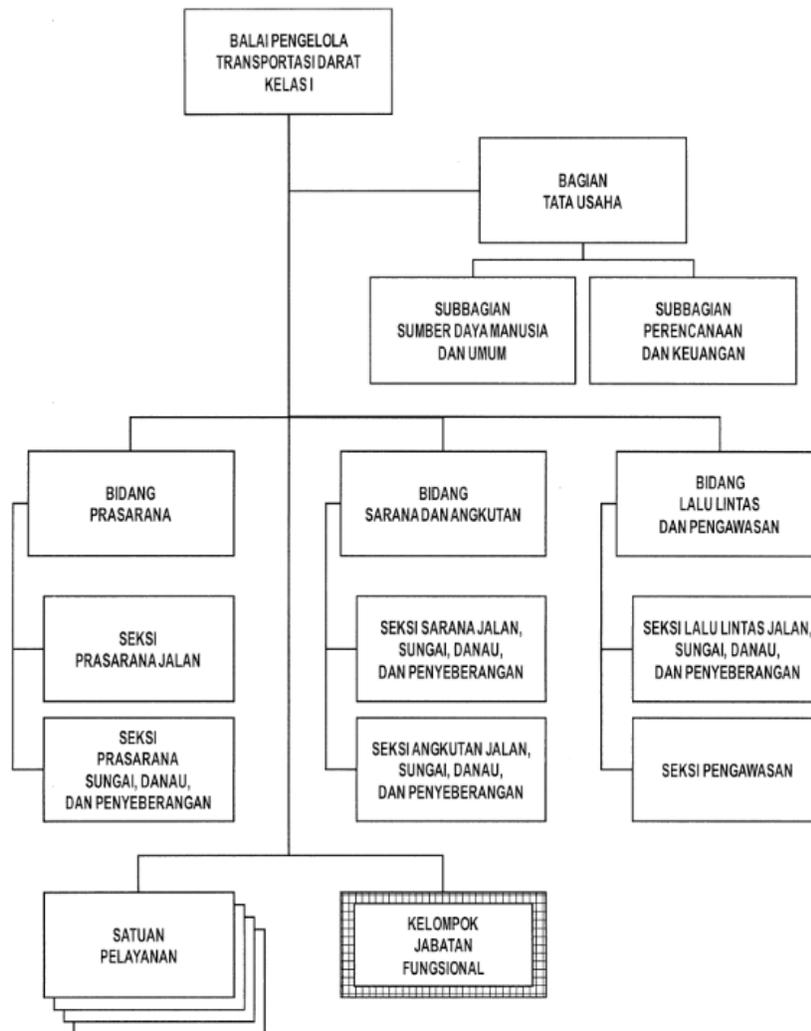
I.2.1. Bagian Struktur Organisasi

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas I. Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum;

- g. Seksi Prasarana Jalan;
- h. Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- i. Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- j. Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- k. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- l. Seksi Pengawasan;
- m. Satuan Pelayanan; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas I



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Tengah

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah 1.104 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah ASN Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai				Lokasi
		PNS	PPPK	PPNPN	TOTAL	
1	Kepala Balai	1	0	0	1	Semarang
2	Bagian Tata Usaha	21	0	27	48	Semarang
3	Bidang Prasarana	11	0	9	20	Semarang
4	Bidang Sarana dan Angkutan	13	5	3	21	Semarang
5	Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan	13	0	8	21	Semarang
6	Terminal Tipe A Bulupitu	25	2	39	66	Banyumas
7	Terminal Tipe A Ir. Soekarno	21	2	50	73	Klaten
8	Terminal Tipe A Giri Adipura	21	2	33	56	Wonogiri
9	Terminal Tipe A Tidar	14	3	26	43	Magelang
10	Terminal Tipe A Mangkang	16	3	32	51	Semarang
11	Terminal Tipe A Bawen	16	3	21	40	Semarang
12	Terminal Tipe A Pekalongan	16	2	16	34	Pekalongan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai				Lokasi
		PNS	PPPK	PPNPN	TOTAL	
13	Terminal Tipe A Kebumen	8	2	34	44	Kebumen
14	Terminal Tipe A Pemalang	22	2	42	66	Pemalang
15	Terminal Tipe A Bobotsari	16	2	18	36	Purbalingga
16	Terminal Tipe A Mendolo	9	1	20	30	Wonosobo
17	Terminal Tipe A Bangsa Mbangun Desa	9	2	23	34	Cilacap
18	Terminal Tipe A Purworejo	13	0	27	40	Purworejo
19	Terminal Tipe A Jati	12	2	16	30	Kudus
20	Terminal Tipe A Cepu	16	1	11	28	Blora
21	Terminal Tipe A Tingkir	11	1	26	38	Salatiga
22	Terminal Tipe A Tegal	7	4	38	49	Tegal
23	Terminal Tipe A Demak	12	2	11	25	Demak
24	UPPKB Subah	13	1	8	13	Batang
25	UPPKB Banyudono	14	2	17	14	Boyolali
26	UPPKB Tanjung	9	5	10	9	Brebes
27	UPPKB Wanareja	10	4	7	10	Cilacap
28	UPPKB Ajibarang	11	2	14	11	Banyumas
29	UPPKB Sarang	8	2	10	8	Rembang
30	UPPKB Klepu	13	1	10	13	Semarang
31	UPPKB Toyogo	0		1	0	Sragen
32	UPPKB Gubug	0		1	0	Grobogan
33	UPPKB Selogiri	0		1	0	Wonogiri
34	UPPKB Pringsurat	0		1	0	Temanggung
35	UPPKB Salam	0		1	0	Magelang
36	UPPKB Sambong	0		0	0	Blora
37	UPPKB Lebuawu	0		1	0	Jepara
38	Pelabuhan Penyeberangan Kendal	2		3	2	Kendal
39	Pelabuhan Penyeberangan Jepara	4		2	4	Jepara
40	Pelabuhan Danau Cacaban Kab. Tegal	1		3	1	Tegal
41	Pelabuhan Danau Gajah Mungkur Kab. Wonogiri	2		1	2	Wonogiri
42	Pelabuhan Danau Kedungombo Kab. Sragen	1		2	1	Sragen
43	Pelabuhan Danau Rawa Pening Kab. Semarang	2		1	2	Semarang
44	Pelabuhan Danau Wadas Lintang Kab. Wonosobo	2		1	2	Wonosobo
45	Pelabuhan Sungai Sleko Kab. Cilacap	2		1	2	Cilacap
46	Pelabuhan Sungai Jipang Kab. Blora	1		2	1	Blora
		418	58	628	1104	

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009
- 4) Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah). Pembentukan Balai

Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan jumlah personil masing – masing Satuan Pelayanan saat ini masih kurang.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis

2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
 - I.2.1. Bagan Struktur Organisasi
- I. 3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
 - I.4.1. Kewenangan
 - I.4.2. Sumber Daya Manusia
 - I.4.3. Anggaran
 - I.4.4. Isu Strategis
 - I.4.5. Ruang Lingkup
- I. 5. Sistematika Laporan
- I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I. 7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - I.7.1. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - I.7.2. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II. 1. Tahapan Pengukuran Kinerja
- II. 2. Pengukuran Capaian Kinerja

II.2.1 **SK1** Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transpostasi

1. **IKK 1.1** Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. **IKK 1.3** Jumlah Terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. **IKK 1.4** Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

4. **IKK 1.6** Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 **SK2** Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat

1. **IKK 2.1** Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - 2. **IKK 2.2** Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - 3. **IKK 2.3** Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.2.3 **SK4** Meningkatnya keselamatan transportasi darat
- 1. **IKK 3.1** Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
2. **IKK 3.2** Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
3. **IKK 3.5** Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 **SK5** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

1. **IKK 5.1** Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 **SK1** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

1. **IKK 1** Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1. Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3. Rencana Aksi Tahun 2025
4. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025
7. SK Manual IKK Tahun 2025

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat sebagaimana dalam tabel 1.3 Rencana Strategis BPTD Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Tabel 1.3 Rencana Strategis BPTD Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18	18	18	18	18
			IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	3	1	0	0
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	9	9	9	9
2	SK2	Meningkatnya kinerja	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum	%	55	60	60	65	65

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
		pelayanan transportasi darat		(SPM) di terminal tipe-A						
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	55	57	57	60
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12	12	12	12	12
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17	21,14	22,23	23,46	24,72
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9	9	9	9	9
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	10	15	20	25
			IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	0	0
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250	250	250	250	250
			IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	0	0	0	0	0
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	91	91	91	91	92

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90	90	90

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Guna mencapai sasaran, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah memperhatikan konsep Balanced Score Card (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja setiap tahunnya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18
			IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	55
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
			IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250
			IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	91
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 serta merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 183.288.242.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berdasarkan DIPA dan POK awal Pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	9
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	55
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal Tipe A	%	55
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 4.370.370.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 51.524.030.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 32.031.779.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 9.061.280.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 24.154.215.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 62.146.568.000

I.7.1 URAIAN REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat pada tanggal 2 Januari 2025, BPTD Kelas II Jawa Tengah resmi menjadi BPTD Kelas I Jawa Tengah. Pada tanggal 07 Januari 2025 telah ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Balai Kelas I Jawa Tengah sesuai Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas

nomor: ST-DJPD 12 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan Revisi I Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah membutuhkan anggaran sebesar Rp. 183.288.242.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) berdasarkan DIPA dan POK revisi ke-1 Pada tanggal 11 Januari 2025 sebagaimana pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	9
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	55
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal Tipe A	%	55
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 4.370.370.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 51.524.030.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 32.031.779.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 9.061.280.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 24.154.215.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 62.146.568.000



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Tahapan pengukuran kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas *inputing, updatang dan monitoring* pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna mempermudah penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Revisi

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah 2025 - 2029, bermuara pada terwujudnya 5 (Lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025 - 2029.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah adalah sebesar 67,72%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Target, realisasi dan capaian IKK dan SK Triwulan I Tahun 2025

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
-1		-2	-3	-4	-5	-6
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					52,53%
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	10,13	10,13%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	18	18	18	100%
IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	1	1	0	0%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	9	9	9	100%
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					33,33%
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	55	55	0	0%
IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	55	55	55	100%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	12	12	0	0%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi					73,06%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	19,17	19,17	18,44	96,19%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9	9	6,93	123,00%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	250	250	0	0%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					81,34%
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	89	72,39	81,34%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					98,34%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	88,51	98,34%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						67,72%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						59,08%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						4
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						8

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Jika dilihat lebih detail Triwulan I Tahun 2025, berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja dari 12 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah, terdapat 4 (empat) IKK berstatus hijau dan 8 (delapan) IKK berstatus merah. Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

II.2.1 SK1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menggunakan 4 (empat) IKK sebagaimana pada tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TW I
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	
		Target		100%
		Realisasi		10,13%
		Capaian		10,13%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang beroperasi	Lokasi	18	
		Target		18
		Realisasi		18
		Capaian		100%
IKK 1.4	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	1	
		Target		1
		Realisasi		0
		Capaian		0%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	9	
		Target		9
		Realisasi		9
		Capaian		100%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.2.1.1 IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	Satuan : %
	Target/ Realisasi/ Capaian	TW I
	Target	100%
	Realisasi	10,13%
	Capaian	10,13%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

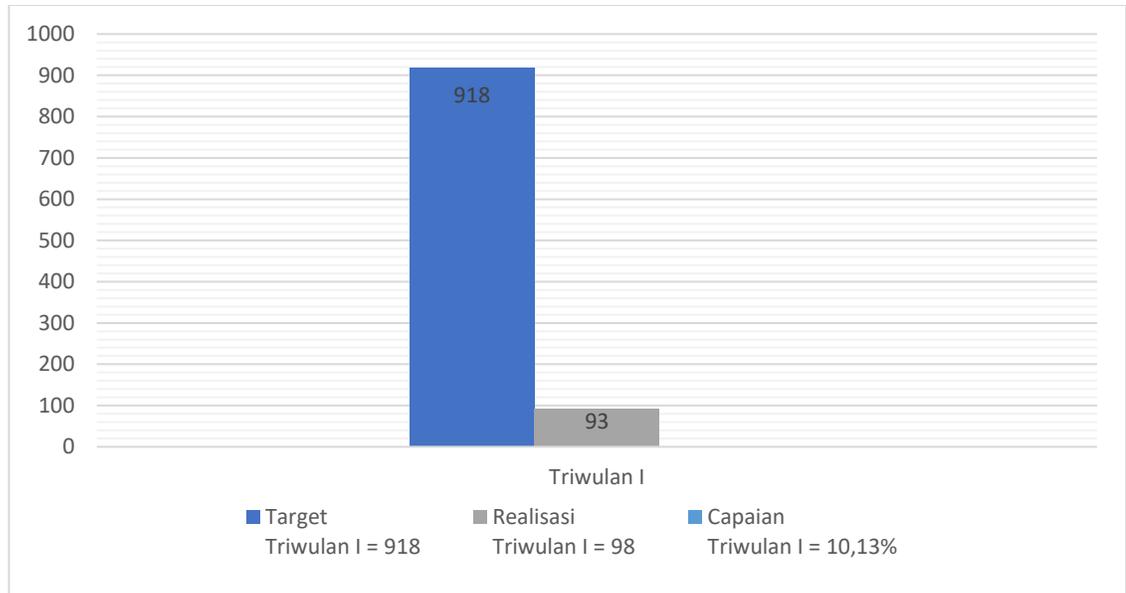
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah realisasi ritase tiap trayek perintis yang dilayani terhadap jumlah ritase tiap jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan.

Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi ritase layanan keperintisan angkutan jalan dibandingkan dengan rencana jumlah ritase yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 sebesar 10,13% jika dibandingkan dengan target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 10,13%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.1 Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
 Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022, menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022 di 32 (tiga puluh dua) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) trayek.
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 Dari jumlah trayek dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022, dari sebanyak 388 trayek, terdapat 1 (satu) trayek yang berada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu Trayek Teluk Penyus – Nusa Wungu dengan rencana ritase tahun 2025 sebanyak 918 ritase.
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis antara lain:

1. SDM yang berkompetensi dalam pelaksanaan keperintisan angkutan jalan;
 2. Persetujuan kontrak pemberian subsidi angkutan jalan perintis oleh Stakeholder terkait;
 3. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis antara lain:
 1. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Menunggu penyesuaian dan pemenuhan lampiran data dukung oleh Stakeholder;
 3. Kurangnya koordinasi dengan Stakeholder terkait.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Ritase}}{\text{Rencana Ritase per tahun}} \times 100\%$$

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 sebesar 100% didapat dari perhitungan jumlah realisasi sebanyak 93 ritase dibandingkan dengan target ritase dalam satu tahun sebanyak 918 ritase dikali seratus persen.

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{93}{918} \times 100\% = 10,13\%$$

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{10,13\%}{100\%} \times 100\% = 10,13\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 memiliki target senilai Rp 1.370.370.000,- dengan realisasi sampai triwulan I Tahun 2025 Rp 0,- atau mencapai 0%. Target dan realisasi anggaran ini berasal dari kegiatan Layanan Angkutan Jalan Perintis Teluk Peny - Nusa Wungu.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menunggu hasil keputusan tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan rapat bersama stakeholder.

II.2.1.3 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Satuan : Lokasi
	Target/ Realisasi/ Capaian	TW I
	Target	18
	Realisasi	18
	Capaian	100%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

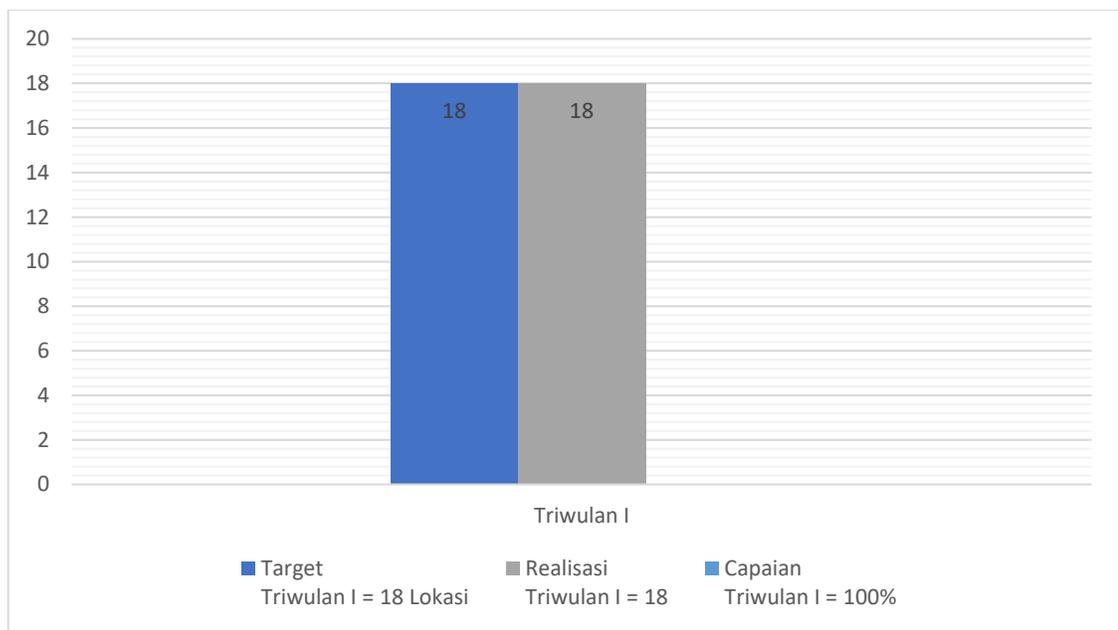
Terminal Tipe A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan Terminal Barang yang beroperasi

merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.

Capaian kinerja jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2025 adalah 18 (delapan belas) lokasi. Jika dibandingkan dengan Revisi I Perjanjian Kinerja maka, capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2025 sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.2 Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi.



Gambar 2.2 Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/ Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dalam Lampiran, jumlah Terminal Tipe A yang berada pada wilayah kerja BPTD Kelas I Jawa Tengah adalah sebanyak 18 lokasi.

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
Dari jumlah Terminal Tipe A di wilayah kerja BPTD Kelas I Jawa Tengah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dalam Lampiran, Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi sebanyak 18 Terminal Tipe A, di mana 1 (satu) Terminal Tipe A telah selesai tahap pembangunan dan mulai beroperasi pada bulan Maret tahun 2025 yaitu Terminal Tipe A Demak. Daftar rincian satuan Pelayanan Terminal Tipe A sebagaimana pada tabel 2.5 Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi.

Tabel 2.5 Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi

NO	NAMA TERMINAL TIPE A	KAB / KOTA
1	Bulupitu	Banyumas
2	Ir. Soekarno	Klaten
3	Giri Adipura	Wonogiri
4	Tidar	Magelang
5	Mangkang	Semarang
6	Bawen	Semarang
7	Pekalongan	Pekalongan
8	Kebumen	Kebumen
9	Pemalang	Pemalang
10	Bobotsari	Purbalingga
11	Mendolo	Wonosobo
12	Bangga Mbangun Desa	Cilacap

NO	NAMA TERMINAL TIPE A	KAB / KOTA
13	Purworejo	Purworejo
14	Jati	Kudus
15	Cepu	Blora
16	Tingkir	Salatiga
17	Tegal	Tegal
18	Demak	Demak

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan beroperasinya Terminal Tipe A dan Terminal Barang antara lain:

1. Jumlah Target Terminal Tipe A yang beroperasi di dalam Revisi I Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan jumlah terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah;
2. Penyiapan SDM dan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk rencana pengoperasian Terminal Tipe A Demak telah dilaksanakan, sehingga pada bulan Maret tahun 2025 Terminal Tipe A Demak telah resmi beroperasi sekaligus membuat keseluruhan jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi pada BPTD Kelas I Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
3. Audiensi kembali dengan Bupati Kabupaten Klaten telah dilaksanakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah resmi menyerahkan aset Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten kepada BPTD Kelas I Jawa Tengah;

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

Faktor - faktor yang mempengaruhi kegagalan beroperasinya Terminal Tipe A dan Terminal Barang antara lain:

1. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran revitalisasi atau peningkatan terminal berdampak pada proses pembangunan yang dilakukan menjadi bertahap dan tidak bisa diselesaikan dalam kurun

waktu satu tahun anggaran;

2. Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan anggaran belanja kebutuhan operasional terminal semakin kurang dan berpotensi menghambat kegiatan operasional terminal;
3. Masih adanya terminal bayangan di beberapa daerah membuat jumlah penumpang yang naik maupun turun dari terminal menjadi sedikit.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi pada Tahun 2025 adalah 18 (delapan belas) lokasi.

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2025 memiliki target sebesar 18 Lokasi. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2025 tidak memiliki anggaran pendukung kegiatan, sehingga tidak memiliki target anggaran.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan permohonan anggaran peningkatan atau revitalisasi Terminal lainnya sesuai dengan kebutuhan agar Terminal dapat beroperasi dengan lebih optimal;
2. Mengajukan tambahan anggaran operasional Terminal Tipe A agar tidak menghambat kegiatan operasional Terminal;

3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar terminal bayangan dapat segera ditertibkan, sehingga diharapkan penumpang naik maupun turun hanya di terminal.

II.2.1.4 IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Satuan : Lokasi
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		1
Realisasi		0
Capaian		0%

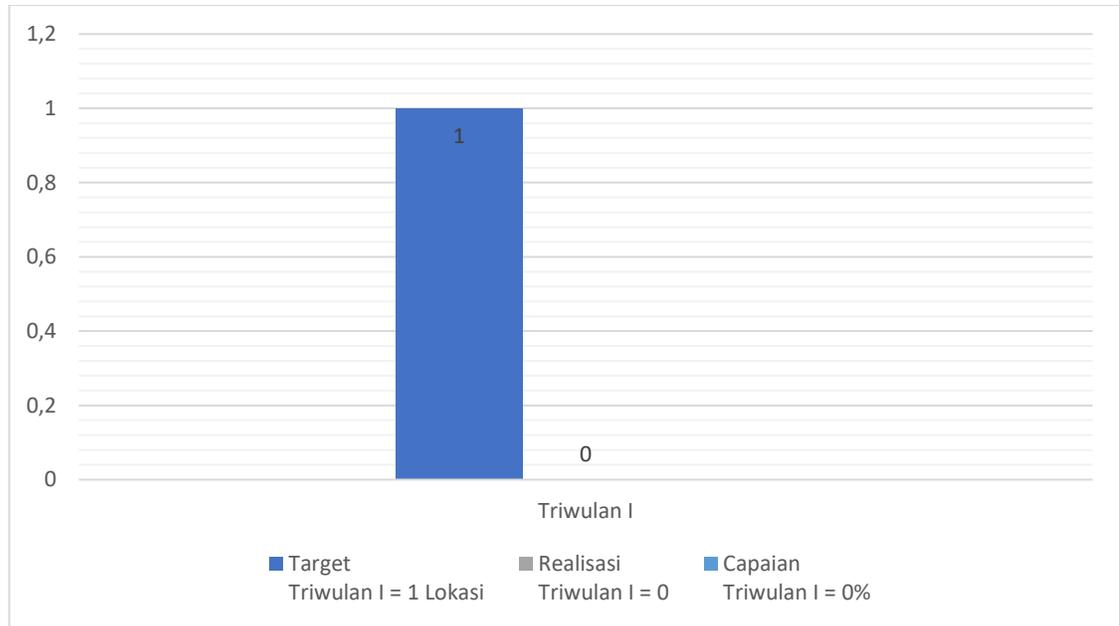
Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Realisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dihitung dari jumlah lokasi terbangunnya Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Belum ada Realisasi kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Revisi I Perjanjian Kinerja maka, capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2025 sebesar 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.2 Capaian IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.



Gambar 2.3 Grafik Capaian IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

a.3. Analisa Keberhasilan/ Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 Pada Tahun 2025 target Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda rencananya akan dilaksanakan di 1 lokasi yaitu di Kabupaten Banyumas. Namun hingga saat ini anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut terkena *efisiensi anggaran*, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2025 anggaran kegiatan tersebut belum dapat digunakan.

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda antara lain:
 1. Pengajuan anggaran pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda untuk tahun ini disetujui, sehingga pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda bisa dilaksanakan;
 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk rencana pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
 3. Lokasi pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda telah ditetapkan.

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor - faktor yang mempengaruhi kegagalan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda antara lain:
 1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kegiatan pendukung yang belum bisa dilaksanakan;
 2. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda sehingga hanya bisa dilaksanakan di 1 (satu) lokasi;
 3. Anggaran yang masih diblokir hingga triwulan I jika tidak segera bisa digunakan akan berpotensi tidak selesainya pekerjaan pada akhir tahun ini.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2025 adalah 1 (satu) lokasi.

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
Pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2025 memiliki target sebesar 1 Lokasi. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2025 yaitu senilai Rp 3.000.000.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 atau mencapai 0%. Target dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda BRT Trans Banyumas yang terkena efisiensi anggaran.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pengajuan usulan ulang anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda dan review desain dengan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
2. Berkoordinasi dengan direktorat terkait agar anggaran pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda dapat segera digunakan kembali;
3. Segera koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membuat penyesuaian rencana pelaksanaan.

II.2.1.5 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Satuan : Lokasi
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		9
Realisasi		9
Capaian		100%

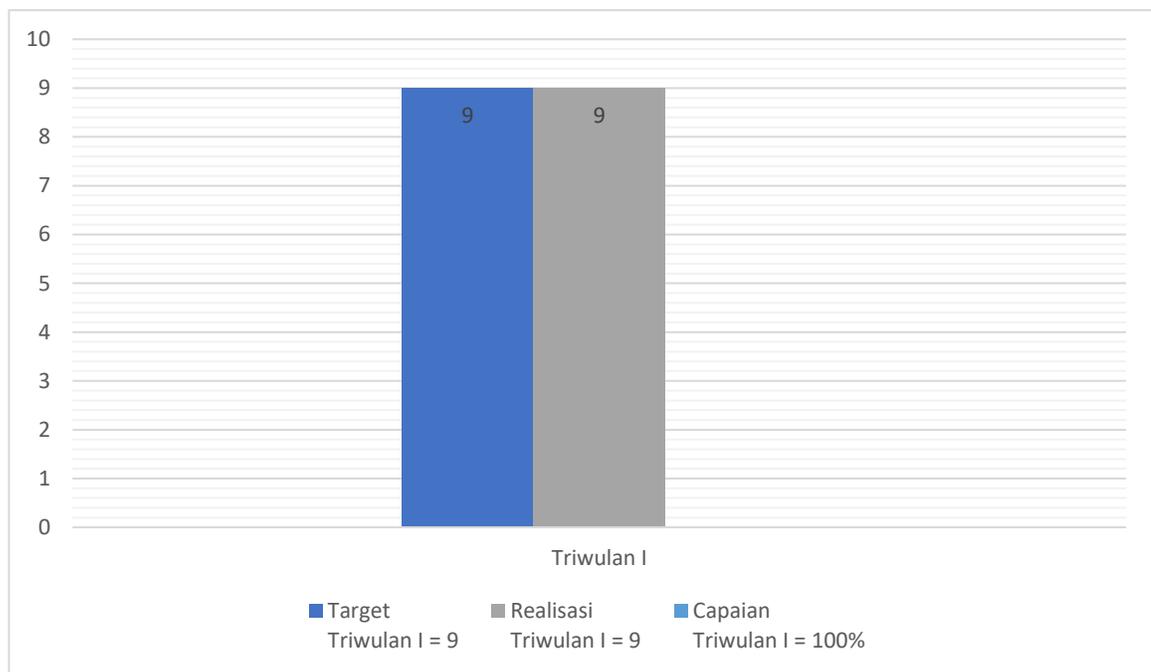
Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan terdiri dari Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 sebesar 9 lokasi maka keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target pada Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.4 Capaian IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar 2.4 Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dalam lampiran, Jumlah Pelabuhan SDP yang telah terdapat Satuan Pelayanan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelabuhan, serta peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan adalah sebanyak 9 lokasi, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Pelabuhan Penyeberangan Jepara, Pelabuhan Sungai Sleko, Pelabuhan Sungai Cacaban, Pelabuhan Sungai Jipang, Pelabuhan Danau Gajah Mungkur, Pelabuhan Danau Kedungombo, Pelabuhan Danau Rawa Pening, Pelabuhan Danau Wadas Lintang.
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dibawah pengawasan BPTD Kelas I Jawa Tengah sesuai target Revisi I Perjanjian Kinerja sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8 Daftar Satuan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI		PENYELENGGARA PELABUHAN
		KAB. / KOTA	PULAU	
1	Kendal	Kab. Kendal	Jawa	Dishub Kabupaten
2	Jepara	Kab. Jepara	Jawa	Dishub Kabupaten
3	Sleko	Kab. Cilacap	Jawa	Dishub Kabupaten
4	Cacaban	Kab. Tegal	Jawa	Dishub Kabupaten
5	Jipang	Kab. Blora	Jawa	Dishub Kabupaten
6	Gajah Mungkur	Kab. Wonogiri	Jawa	Dishub Kabupaten
7	Kedungombo	Kab. Sragen	Jawa	Dishub Kabupaten
8	Rawa Pening	Kab. Semarang	Jawa	Dishub Kabupaten
9	Wadas Lintang	Kab. Wonosobo	Jawa	Dishub Kabupaten

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Daftar Pelabuhan di wilayah kerja BPTD Kelas I Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Otaker BPTD sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan beroperasinya jumlah Pelabuhan SDP antara lain:
 1. Masing-masing satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan telah memiliki Pengawas Satuan Pelayanan;
 2. Terdapat kerja sama yang baik antar instansi (BPTD, DISHUB dan PT. ASDP) sehingga pengoperasian di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar;
 3. Telah terdapat 1 (satu) personil atau lebih pada satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kendal dan satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Jepara yang telah mengikuti Diklat Kesyahbandaran.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan beroperasinya jumlah Pelabuhan SDP antara lain:
 1. Tidak semua Pengawas Satuan Pelayanan memiliki kompetensi di bidang pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 2. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah lokasi kluster pada setiap satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 3. Kurangnya fasilitas utama maupun penunjang untuk mendukung kegiatan pada beberapa satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada Tahun 2025 sebesar 9 lokasi.

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
Pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2025 memiliki target sebesar 9 Lokasi. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 tidak memiliki anggaran pendukung kegiatan, sehingga tidak memiliki target anggaran.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan permohonan kebutuhan Diklat agar jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai Syahbandar Pembantu dapat bertambah untuk memenuhi kebutuhan pada setiap Pelabuhan SDP;
2. Menambah jumlah SDM di setiap satuan pelayanan Pelabuhan SDP agar pengawasan bisa dilaksanakan lebih baik lagi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pengelola Pelabuhan maupun paguyuban setempat agar Pelabuhan SDP dapat beroperasi dengan optimal.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menggunakan 3 (Tiga) IKK, yaitu:

Tabel 2.9 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TW I
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	55	
		Target		55
		Realisasi		0
		Capaian		0
IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	55	
		Target		55
		Realisasi		55
		Capaian		100
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	12	
		Target		12
		Realisasi		0
		Capaian		0

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.2.2.1 IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		55
Realisasi		0
Capaian		0

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

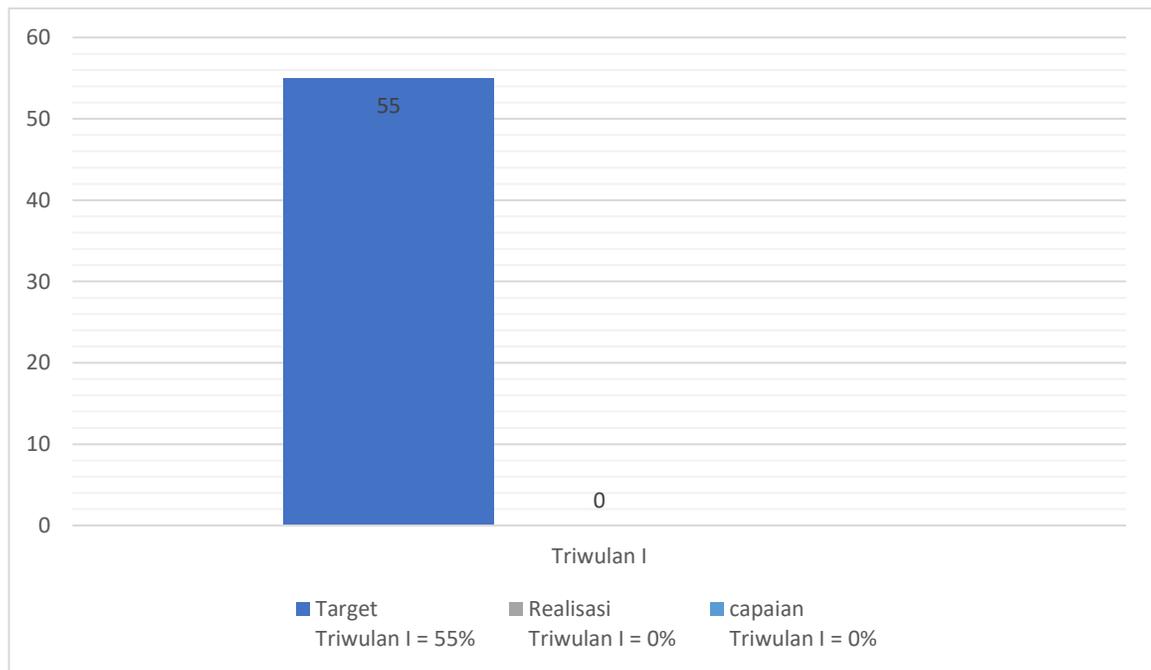
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A dihitung pada Terminal Tipe A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A dihitung berdasarkan perbandingan Total Nilai Standar

Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A terhadap Jumlah Terminal Tipe A yang telah ditetapkan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2025 sebesar 0 maka capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A terhadap target pada Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.5 Grafik Capaian IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A.



Gambar 2.5 Grafik Capaian IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/

keterjangkauan, pelayanan kesetaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja Target kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A sesuai target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 55. Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran perjalanan dinas menyebabkan kegiatan perjalanan dinas untuk melaksanakan penilaian SPM Terminal Tipe A belum dapat dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025. Tata cara perhitungan SPM Terminal Tipe A menggunakan dasar PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A antara lain:
 1. Telah berkontraknya pekerjaan *Excellent Service* pada beberapa Terminal Tipe A sejak Bulan Januari membuat kebersihan dan keamanan area pelayanan penumpang di Terminal Tipe A semakin baik;
 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada para petugas di lapangan terkait penanganan penumpang penyandang disabilitas di Terminal Tipe A sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada penumpang;
 3. Adanya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Terminal Tipe A untuk memberikan ruang penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A antara lain:
 1. Banyak fasilitas utama dan penunjang yang butuh perbaikan atau penggantian;

2. Jumlah SDM setiap regu untuk melaksanakan pelayanan di terminal masih kurang;
 3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran perjalanan dinas menyebabkan kegiatan perjalanan dinas untuk melaksanakan penilaian SPM Terminal Tipe A belum dapat dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025.
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

Sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan penilaian SPM Terminal Tipe A di wilayah kerja BPTD Kelas I Jawa Tengah. Daftar Nilai SPM Terminal Tipe A Tahun 2025 sesuai tabel 2.11.

Tabel 2.11 Daftar Nilai SPM Terminal Tipe A Tahun 2025

NO	SATUAN PELAYANAN	TOTAL PENILAIAN SPM	KETERANGAN
1	TTA Mendolo, Kab. Wonosobo	-	
2	TTA Ir. Soekarno, Kab. Klaten	-	
3	TTA Bawen, Kab. Semarang	-	
4	TTA Giri Adipura, Kab. Wonogiri	-	
5	TTA Tingkir, Kota Salatiga	-	
6	TTA Bangsa Mbangun Desa, Kab. Cilacap	-	
7	TTA Bulupitu, Kab Banyumas	-	
8	TTA Mangkang, Kota Semarang	-	
9	TTA Jati, Kab. Kudus	-	
10	TTA Kebumen, Kab. Kebumen	-	
11	TTA Purworejo, Kab. Purworejo	-	
12	TTA Pemalang, Kota Pemalang	-	
13	TTA Pekalongan, Kota Pekalongan	-	
14	TTA Tegal, Kota Tegal	-	
15	TTA Bobotsari, Kab. Purbalingga	-	
16	TTA Cepu, Kab. Blora	-	
17	TTA Tidar, Kota Magelang	-	
18	TTA Demak, Kab. Demak	-	

Sumber: Data diolah BPTD Kelas I Jawa Tengah

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

$$Realisasi = \frac{0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0}{18}$$

$$Realisasi = 0$$

Berdasarkan dari rekapitulasi hasil penilaian Standar Pelayanan Minimum Terminal Tipe A di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah, realisasi kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2025 terhadap target pada Revisi Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 0. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran perjalanan dinas menyebabkan kegiatan perjalanan dinas untuk melaksanakan penilaian SPM Terminal Tipe A belum dapat dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2025 sebesar 0%. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{0}{55} \times 100\% = 0\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2024 yaitu senilai Rp 35.916.024.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 6.720.773.535,- atau mencapai 18,71%. Target dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan

Operasional Terminal Penumpang Tipe A dan Excellent Service Terminal Penumpang Tipe A.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan penambahan anggaran perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan penilaian SPM Terminal Tipe A;
2. Koordinasi dengan Terminal Tipe A yang ada di Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan SPM pada Terminal Tipe A;
3. Menghimbau kepada Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A agar mengusulkan perbaikan atau peningkatan fasilitas-fasilitas terminal yang masih belum sesuai dengan SPM.

II.2.2.2 IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		55
Realisasi		55
Capaian		100

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

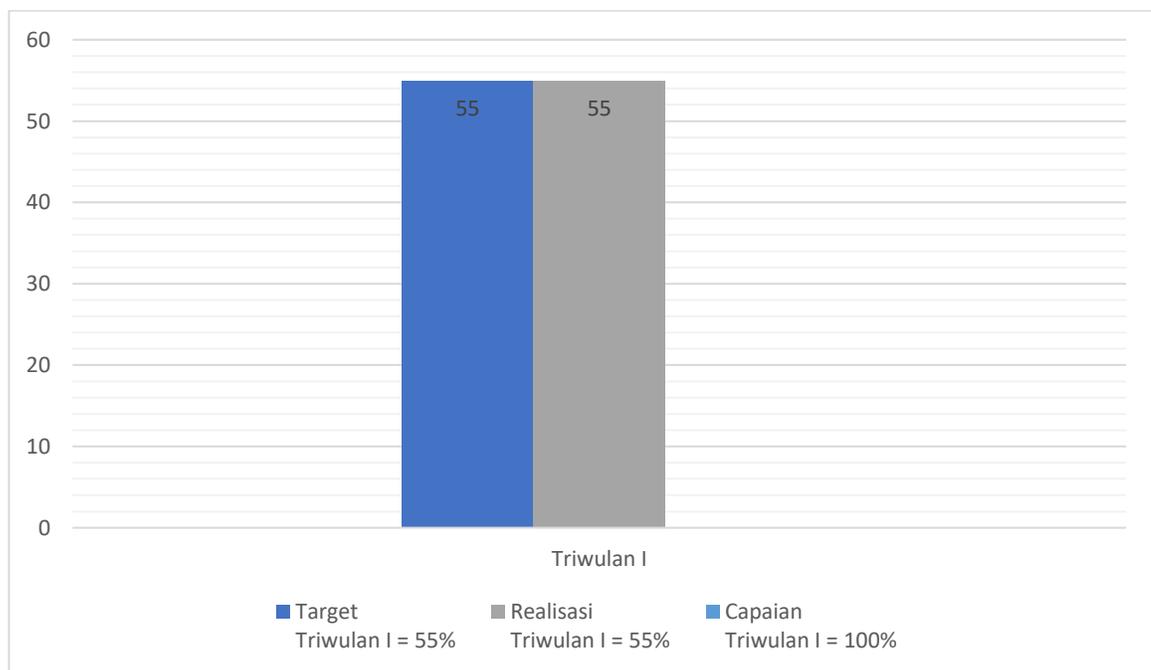
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penerapan SMART Terminal Tipe A berupa Terminal Tipe A yang telah menerapkan pelaporan data penumpang datang dan berangkat secara online/ pelaporan data bus datang dan berangkat di terminal secara online/ vending machine/ pintu otomatis penumpang/pintu Gerbang Otomatis Kendaraan/ Tampilan Informasi Digital dibagi jumlah terminal kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang beroperasi.

Persentase penerapan SMART terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu: Vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, Counting passenger, information display. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan inputing data produksi terminal ke dalam aplikasi TOS dan data rampcheck ke dalam aplikasi <http://inspeksi-keselamatanhubdat.com/>

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 55%. Realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 55%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.6 Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal Tipe A.



Gambar 2.6 Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan/ Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/ keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/ keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Terminal Tipe A perlu dilakukan upaya pelaksanaan SMART terminal yang meliputi kegiatan: pelaporan data penumpang datang dan berangkat secara online, pelaporan data bus datang dan berangkat di terminal secara online, vending machine, pintu otomatis penumpang, Pintu Gerbang Otomatis Kendaraan, dan Tampilan Informasi Digital. Pada saat ini, di seluruh terminal yang ada di wilayah kerja telah melakukan pelaporan data penumpang datang dan berangkat secara online, pelaporan data bus datang dan berangkat di terminal secara online dan Tampilan Informasi/ digital.
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
Target kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A sesuai target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 55. Jumlah Terminal yang menerapkan SMART Terminal Tipe A ada 2 terminal, yaitu Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten dan Terminal Tipe A Bulupitu Banyumas.
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A antara lain:
 1. Integrasi menjadi satu sistem aplikasi data produksi Terminal Tipe A melalui aplikasi MitraDarat;
 2. Aplikasi MitraDarat dapat digunakan baik pada dekstop maupun mobile;
 3. Pelaporan data produksi terminal dapat termonitoring secara realtime dengan sistem online;
 4. Terdapat Fasilitas SMART Terminal seperti Vending Machine, Passenger

Barrier Gate, Vehicle Barrier Gate, CCTV, Counting Passenger dan Information Display pada Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten dan Terminal Tipe A Bulupitu.

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A antara lain:
 1. Server pada aplikasi MitraDarat terkadang mengalami kendala jaringan;
 2. Fasilitas SMART Terminal seperti Vending Machine, Passenger Barrier Gate, Vehicle Barrier Gate, Counting Passenger dan Information Display belum sepenuhnya ada di seluruh Terminal Tipe A di wilayah Jawa Tengah;
 3. Fasilitas SMART Terminal seperti Vending Machine, Passenger Barrier Gate, Vehicle Barrier Gate, CCTV, Counting Passenger dan Information Display yang terdapat pada Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten dan Bulupitu Tidak Berfungsi dan belum dilakukan serah terima sehingga tidak dapat dilakukan pemeliharaan dan perbaikan;
 4. Anggaran kegiatan pendukung Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A terkena kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2025 kegiatan pendukung tersebut belum dapat dilaksanakan.
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja.
Realisasi kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2025 sebesar 55%. Hasil penilaian penerapan SMART Terminal Tipe A pada 2 terminal, yaitu Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten dan Terminal Tipe A Bulupitu Banyumas dengan data sesuai tabel 2.13 Hasil Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2025.

Tabel 2.13 Hasil Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2025

No	Item Penilaian	Nilai	Ir. Soekarno	Bulupitu
1	Vending Machine	20%	0%	0%
2	Passenger Barrier gate	20%	0%	0%
3	Vehicle barrier gate	20%	0%	0%
4	CCTV	10%	10%	10%
5	Counting passenger	10%	0%	0%
6	Information display	20%	0%	0%
Total Nilai		100%	10%	10%
Rata - rata		10%		

Sumber: Data diolah BPTD Kelas I Jawa Tengah

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase TTA Online

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$\text{Persentase TTA Online} = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = (\text{Persentase TTA Online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Realisasi} = (100\% \times 50\%) + (10\% \times 50\%) = 55\%$$

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 55%. Untuk menghitung capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2025 senilai Rp 14.000.000.000,- dengan belum ada realisasi hingga triwulan I Tahun 2025 karena anggaran kegiatannya mengalami efisiensi anggaran. Target dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan Pengadaan Perangkat Smart Jembatan Timbang Online (JTO) – Klepu, Pengadaan Perangkat Smart Terminal Bulupitu Purwokerto, Pengadaan Perangkat Smart Terminal Tirtonadi dan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perlu adanya sistem yang terintegrasi pada seluruh Terminal Tipe A yang ada di Jawa Tengah mengenai informasi tentang Jadwal Keberangkatan, Kedatangan, dan Bus apa saja yang masuk dan keluar terminal serta tracking Bus yang dalam perjalanan serta terhubung ke aplikasi Kementerian Perhubungan seperti Mitra Darat agar penumpang dapat mengetahui bus sedang berada dimana dan kapan perkiraan waktu tiba di terminal;
2. Meningkatkan pelayanan Terminal Tipe A berbasis Teknologi, misalnya penjualan tiket bus secara online, sistem tiket elektronik atau e-ticketing serta sistem informasi berbasis elektronik yang *realtime*;
3. Meningkatkan pelayanan terminal berbasis teknologi yang terintegrasi, yaitu menggunakan MitraDarat serta Terminal Online System (TOS), vending machine, pintu otomatis penumpang, Pintu Gerbang Otomatis Kendaraan, dan Tampilan Informasi Digital agar dikembangkan lagi supaya data produksi terminal secara otomatis terekam dalam database;
4. Mengajukan pembukaan blokir anggaran kegiatan pendukung Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A agar kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan.

II.2.2.3 IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

SK 2		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		12
Realisasi		0
Capaian		0

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Permenhub Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan meliputi :

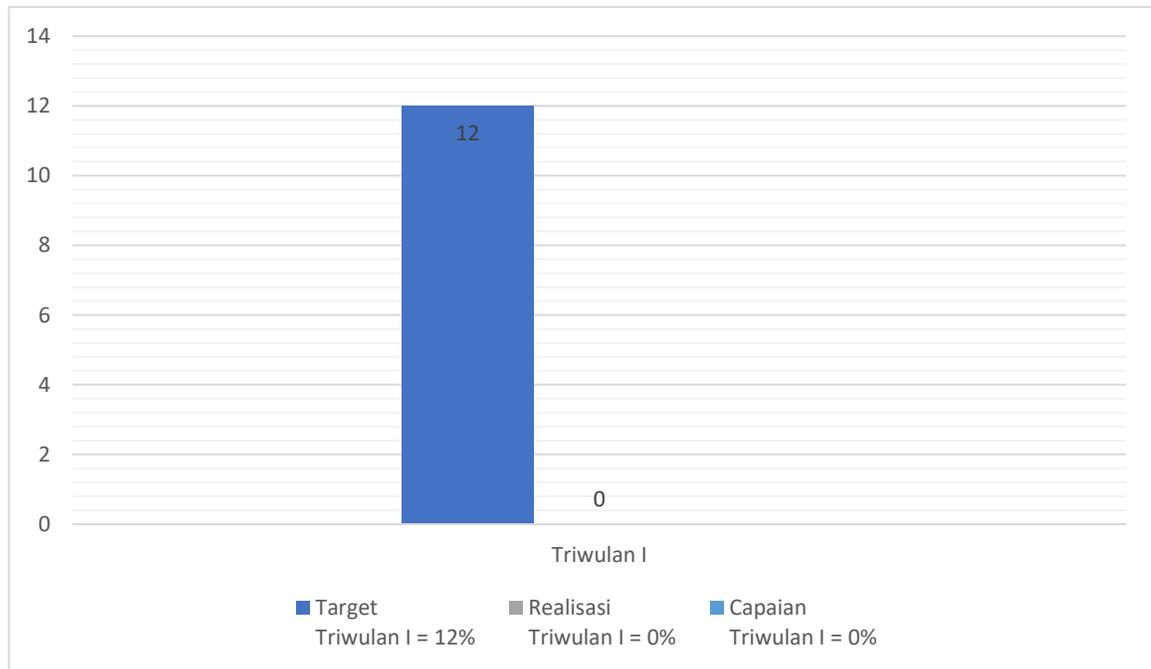
1. Pelayanan Keselamatan;
2. Pelayanan Keamanan;
3. Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
4. Pelayanan Kenyamanan;
5. Pelayanan Kemudahan/keterjangkauan;
6. Pelayanan Kesetaraan.

Standar pelayanan dibagi menjadi 3 yaitu: Pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Pemerintah Daerah. Capaian Kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Pelabuhan yang kondisinya baik terhadap Jumlah Pelabuhan SDP.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 12%. Realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 0%.

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.7 Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pelabuhan SDP.



Gambar 2.7 Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dipedomani melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
Target kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sesuai target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 12%. Jumlah Pelabuhan SDP yang dinilai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ada 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kendal dan Pelabuhan Penyeberangan Jepara.

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain:
 1. Adanya SDM yang berkompeten dari pihak BPTD untuk melaksanakan pemeriksaan SPM Pelabuhan;
 2. Terdapat koordinasi yang baik dari pihak BPTD dan Dishub terkait pemeriksaan SPM Pelabuhan;
 3. Telah disusunnya jadwal rencana pelaksanaan SPM Pelabuhan SDP.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain:
 1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran perjalanan dinas menyebabkan kegiatan perjalanan dinas untuk melaksanakan penilaian SPM Pelabuhan SDP belum dapat dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025;
 2. Untuk pelaksanaan SPM Pelabuhan harus menunggu surat permohonan dari pihak Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pemeriksaan;
 3. Banyaknya fasilitas utama dan penunjang yang kondisinya sudah tidak layak, namun Pemerintah Daerah selaku pemilik asset Pelabuhan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pemeliharaan.
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 sebesar 0%. Pelaksanaan penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kendal dan Pelabuhan Penyeberangan Jepara belum dapat dilaksanakan karena anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan penilaian SPM mengalami efisiensi anggaran. Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0 + 0}{9} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 0\%$$

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 12%. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{12} \times 100\% = 0\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 senilai Rp 2.195.037.000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp 205.957.708,- atau mencapai 9,38%. Target dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan penambahan anggaran perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan penilaian SPM Pelabuhan SDP;
2. Berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan dan Dinas Perhubungan terkait agar dapat memenuhi jenis pelayanan yang belum tersedia pada pelabuhan penyeberangan yang sekiranya dapat terpenuhi agar pemenuhan indikator SPM dapat terpenuhi;
3. Memberikan kuesioner yang berisi survey kepuasan pelayanan penumpang yang terdapat pada pelabuhan untuk evaluasi peningkatan SPM.

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menggunakan 3 (Tiga) IKK sebagaimana pada tabel 2.15 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.

Tabel 2.15 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TW I
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	19,17	
		Target		19,17
		Realisasi		18,44
		Capaian		96,19
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9	
		Target		9
		Realisasi		6,93
		Capaian		123,02
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	%	250	
		Target		250
		Realisasi		0
		Capaian		0

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.2.3.1 IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

Tabel 2.16 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		19,17
Realisasi		18,44
Capaian		96,19

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

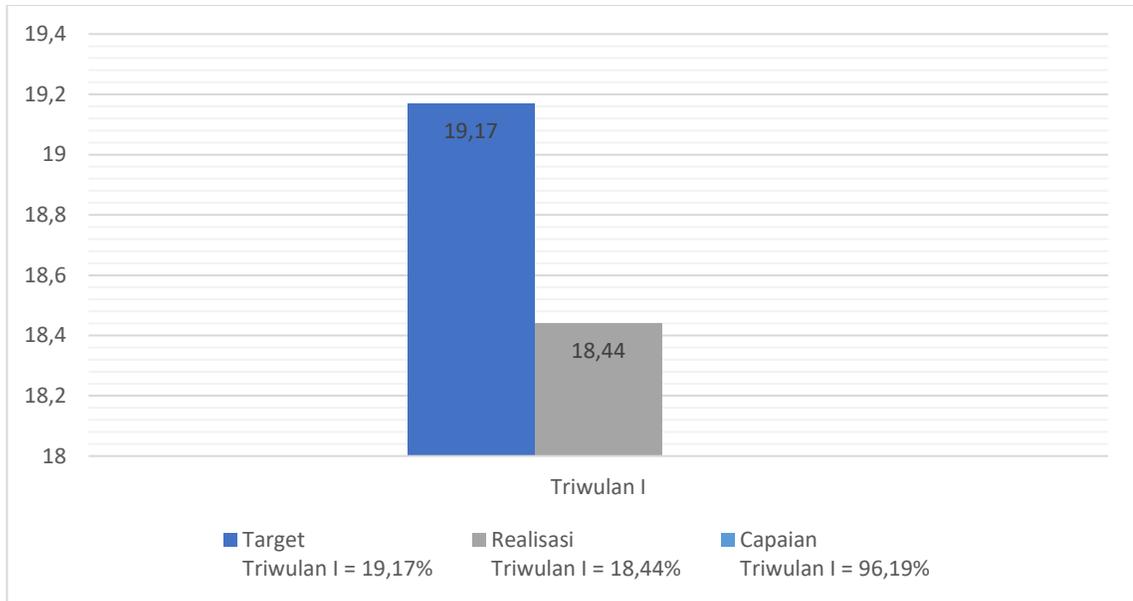
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 9 (sembilan) Item perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (sembilan) item Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015 dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengamanan Jalan
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2025 sebesar 19,17%. Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2025 sebesar 18,44%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.8 Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.



Gambar 2.8 Grafik Capaian IKK 3.1 persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD mempunyai tugas dan fungsi peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu salah satunya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan berpedoman melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tanggal 14 November 2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
Target kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sesuai Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2025 sebesar 19,17%.

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal antara lain:
 1. Data dukung pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan jalan sudah lengkap;
 2. Adanya dukungan dari Dinas Perhubungan setempat sehingga dapat meminimalisir potensi resiko kesalahan lokasi pemasangan;
 3. Dukungan penuh dari para pimpinan Internal.

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal antara lain:
 1. Anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan jalan terkena efisiensi anggaran, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat dilaksanakan;
 2. Banyaknya Perlengkapan Jalan yang rusak diluar perkiraan;
 3. Terlalu banyaknya permohonan perlengkapan jalan dibandingkan dengan anggaran yang tersedia sehingga diperlukan waktu untuk mengevaluasi mana yang sebaiknya di dahulukan.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 Realisasi kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2025 sebesar 18,44%. Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan cara menghitung rata-rata realisasi setiap item (9 item) perlengkapan. Untuk menghitung realisasi setiap item perlengkapan jalan tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{kondisi ideal}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Rambu} = \frac{6.010}{21.767} \times 100\% \qquad \text{Realisasi} = 27,61\%$$

$$\text{Realisasi APILL} = \frac{183}{670} \times 100\% \qquad \text{Realisasi} = 27,31\%$$

$$\text{Realisasi Warning Light} = \frac{3.003}{4.709} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 63,77\%$$

$$\text{Realisasi APJ} = \frac{4.854}{31.742} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 15,29\%$$

$$\text{Realisasi Guardrail} = \frac{8.786}{79.263} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 11,08\%$$

$$\text{Realisasi Deliniator} = \frac{3.437}{23.221} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 14,80\%$$

$$\text{Realisasi Marka} = \frac{292.042}{7.906.725} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 14,80\%$$

$$\text{Realisasi Paku Jalan} = \frac{4.260}{176.691} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 2,41\%$$

$$\text{Realisasi Cermin Tikung} = \frac{0}{6.326} \times 100\% \quad \text{Realisasi} = 0,00\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata realisasi} &= \frac{27,29\% + 27,31\% + 63,73\% + 14,04\% + 11,05\% + 16,63\% + 3,20\% + 2,23\% + 0\%}{9} \\ &= 18,44\% \end{aligned}$$

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada tahun 2025 memiliki target sebesar 19,17% dengan capaian kinerja 96,19%. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{18,44}{19,17} \times 100\% = 96,19\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 20.878.551.000,- namun belum ada realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 atau 0%. Hal ini disebabkan anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan jalan terkena efisiensi anggaran, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat dilaksanakan. Target dan realisasi

anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, penanganan lokasi rawan kecelakaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan jalan;
2. Membuat schedule (rencana) untuk pemasangan perlengkapan jalan agar selesai tepat waktu;
3. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk mengetahui prioritas pekerjaan yang akan didahulukan.

II.2.3.2 IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Satuan : %
	Target/ Realisasi/ Capaian	TW I
	Target	9
	Realisasi	6,93
	Capaian	123,02

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

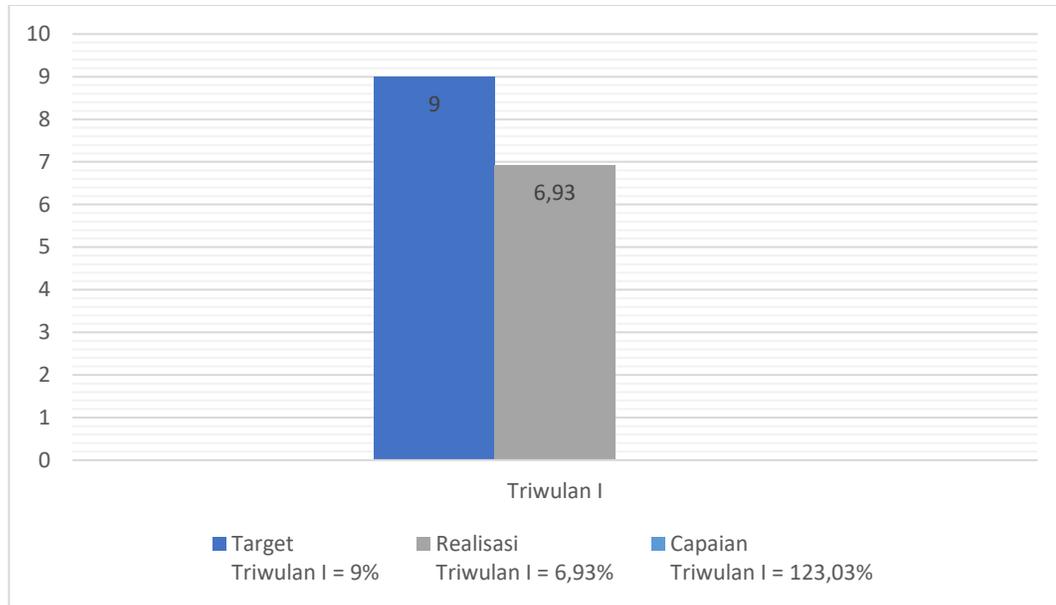
Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Pasal 5 ayat 2 menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan angkutan barang;
3. Tekanan seluruh sumbu dan/ atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
4. Dokumen angkutan barang;
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa dan;
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kendaraan yang melanggar terhadap jumlah kendaraan yang masuk UPPKB. Target Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 9%. Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 6,93%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.9 Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar 2.9 Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ada di wilayah BPTD Kelas I Jawa Tengah sebanyak 14 lokasi.
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 Dari 14 lokasi UPPKB di wilayah kerja BPTD Kelas I Jawa Tengah, sebanyak 7 lokasi UPPKB yang aktif beroperasi dan 7 lokasi UPPKB yang tidak aktif beroperasi atau jaga aset seperti pada tabel 2.18 Daftar Satuan Pelayanan UPPKB yang ada di wilayah BPTD Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025. Target kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada 7 UPPKB yang aktif beroperasi tersebut sebesar 9%.

Tabel 2.18 Daftar Satuan Pelayanan UPPKB yang ada di wilayah BPTD Kelas I Jawa Tengah Tahun 2025

NO	NAMA UPPKB	ALAMAT		STATUS
		KAB/KOTA	JALAN	
1	Subah	Batang	Rejomulya, Jatisari, Kec. Subah	Beroperasi
2	Banyudono	Boyolali	Jl. Solo-Semarang Km. 13 Desa Kuwiran, Kec. Banyudono	Beroperasi
3	Tanjung	Brebes	Jln. Cendrawasih No. 609, tanjung Sawah, Ladang, Krangkahan	Beroperasi
4	Wanareja	Cilacap	Jl. Raya Banjarpatroman-Majenang No. 48, Desa Madura Kec. Wanareja	Beroperasi
5	Ajibarang	Banyumas	Jl. Raya Purwokerto-Tegal, Ds. Pandansari Kec. Ajibarang	Beroperasi
6	Sarang	Rembang	Desa Temperak, Kec. Sarang	Beroperasi
7	Klepu	Semarang	Jl. Soekarno-Hatta Km. 30 Randugunting bergas	Beroperasi
8	Gubug	Grobogan	Jl. Raya Semarang- Purwodadi No 2, kec. Gubug	Tidak Beroperasi
9	Lebuawu	Jepara	Jl. R a y a Kudus –Jepara Km.15 Desa Lebuawu Kec. Pecangaan	Tidak Beroperasi
10	Salam	Magelang	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta km23 Kec. Salam	Tidak Beroperasi
11	Toyoga	Sragen	Jl. Raya Timur area Sawah Toyogo kec. Sambung macan	Tidak Beroperasi
12	Pringsurat	Temanggung	Jln. Semarang-Secang, Rejosari Kec, Pringsurat	Tidak Beroperasi
13	Sambong	Blora	Jln. Raya Cepu-Blora Km 7	Tidak Beroperasi
14	Selogiri	Wonogiri	Jl. Solo-Wonogiri Km 25, selogiri	Tidak Beroperasi

Sumber: Data diolah BPTD Kelas I Jawa Tengah

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya surat Dirjen tentang Operasi Simpatik Sadar Keselamatan Tanpa Over Dimension Ove Loading (ODOL);
2. Setiap UPPKB telah terdapat SDM yang mempunyai lisensi Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;

3. Setiap UPPKB telah terdapat SDM yang mempunyai lisensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pemeriksaan ataupun penilangan kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:
 1. Masih adanya oknum pemilik perusahaan yang tidak mau menerima masukan tentang keselamatan kendaraan-kendaraannya;
 2. Tidak adanya target dari Dirjen Perhubungan Darat mengenai berapa banyak kendaraan yang masuk UPPKB;
 3. Ada beberapa UPPKB yang alat penimbangannya rusak.
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Berdasarkan hasil Laporan Bulanan 7 (Tujuh) satuan Pelayanan UPPKB yang beroperasi pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.19 Daftar Rekapitulasi Data Pelanggaran UPPKB sampai dengan Triwulan I

Periode	Jumlah Kendaraan Masuk UPPKB	Jumlah Kendaraan Melanggar	Jumlah Kendaraan Tidak Melanggar
Triwulan I	40.026	2.773	37.253

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 2.773 kendaraan barang yang melakukan pelanggaran, jika dibandingkan dengan Jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB sebesar 40.026 kendaraan, maka realisasi kinerja mencapai 6,93%.

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100 \%$$

Capaian Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 senilai 123,02%. Perhitungan Capaian Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{9 - (6,93 - 9)}{9} \times 100\% = 123,02\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 9.859.054.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Rp. 758.362.995,- atau mencapai 7,69%. Target dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan Operasional UPPKB dan Alat uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan jumlah kendaraan masuk UPPKB dan jumlah kendaraan melanggar melalui aplikasi JTO dan laporan bulanan;
2. Mengajukan permohonan perbaikan Sarana dan Prasarana UPPKB;
3. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada para pemilik kendaraan yang wajib masuk UPPKB tentang tertib administrasi.

II.2.3.5 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Tabel 2.20 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		250
Realisasi		0
Capaian		0

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

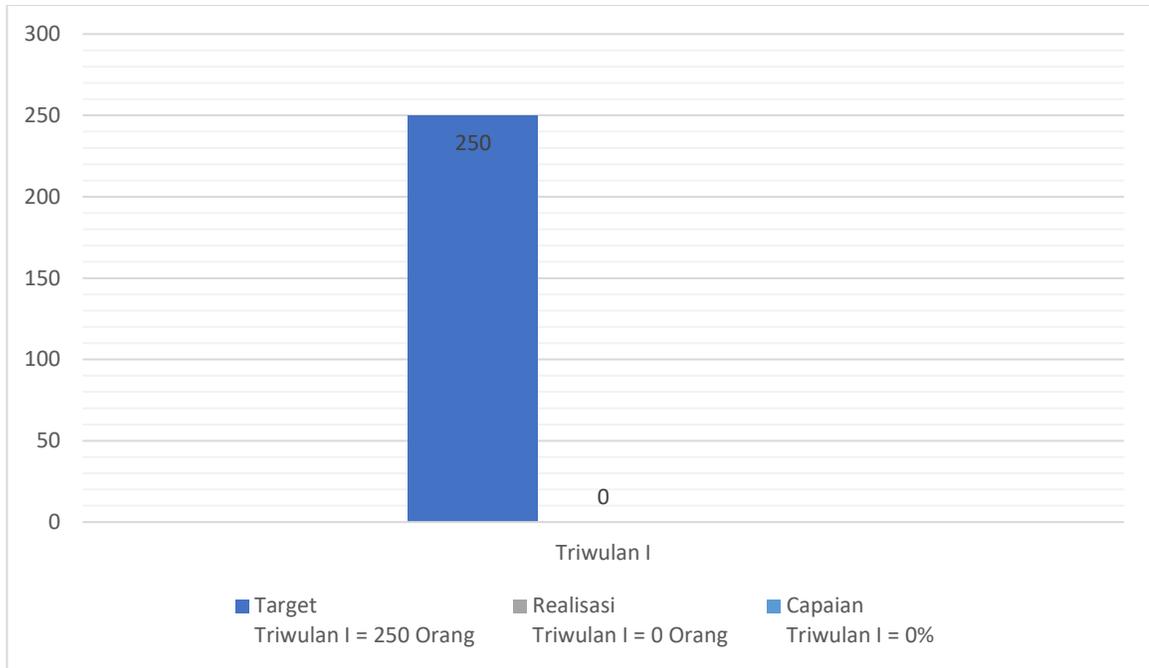
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan yang diselenggarakan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan Balai Pengelola Transportasi Darat yang diukur melalui absensi kehadiran.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan pada Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki target 250 orang. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.10 Grafik Capaian IKK 3.5 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.



Gambar 2.10 Grafik Capaian IKK 3.5 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
Sosialisasi mengenai keselamatan transportasi jalan bisa berpedoman dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja 2025 untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebanyak 250 orang.
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:
 1. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana pelaksanaan sosialisasi keselamatan jalan;
 2. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi direncanakan bersamaan dengan event PKJ 2025;

3. Menyediakan SDM yang berkompeten dalam memberikan informasi dan materi terkait keselamatan transportasi jalan.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:
 1. Anggaran kegiatan Pekan Keselamatan Jalan dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini mengalami efisiensi anggaran, sehingga belum bisa dilaksanakan;
 2. Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait kegiatan sosialisasi keselamatan jalan;
 3. Lokasi yang kurang ideal untuk menampung seluruh target jumlah peserta sosialisasi beserta perlengkapannya.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Untuk menghitung realisasi kinerja indikator kinerja kegiatan jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \text{Jumlah Kehadiran Peserta sd Tahun } (n)$$

Belum ada realisasi kegiatan pendukung indikator kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
Capaian kinerja dihitung dengan cara membandingkan realisasi sebanyak 0 orang dibanding target sebanyak 250 orang, sehingga capaian kinerja mencapai 0%.
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan Tahun

2025 yaitu senilai Rp. 357.143.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 atau 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar bisa segera melaksanakan kegiatan tersebut;
2. Secara berkala melakukan sosialisasi dengan menggunakan beberapa media sosial agar banyak masyarakat yang mengetahui dan harapannya dapat semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan transportasi jalan;
3. Menyesuaikan rencana jadwal pelaksanaan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran agar tetap bisa dilaksanakan di waktu yang ideal.

II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menggunakan 1 (Satu) IKK sebagaimana pada tabel 2.21 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

Tabel 2.21 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TW I
SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	%	89	
		Target		89
		Realisasi		72,39
		Capaian		81,34

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.2.4.1 IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Tabel 2.22 Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		89
Realisasi		72,39
Capaian		81,34

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Aspek Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

1. Aspek perencanaan;
2. Aspek kepegawaian (SDM);
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Penyelenggaran Perkantoran (umum)

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari : dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan E-Planning dan penginputan aplikasi E-Performance.

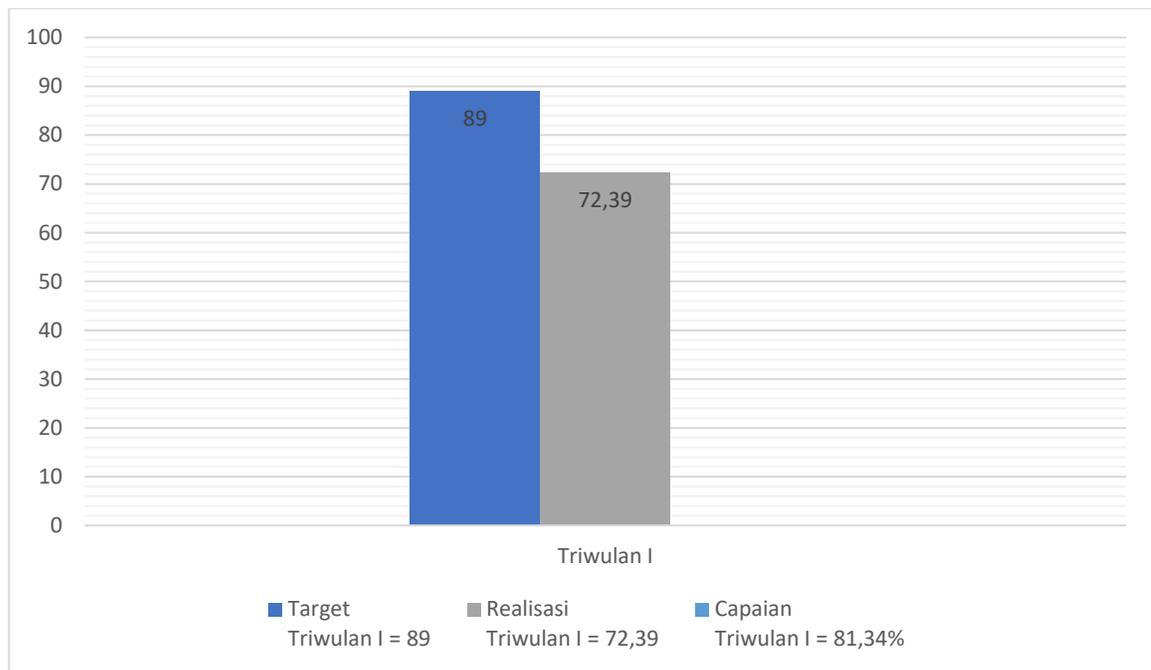
Aspek kepegawaian dinilai melalui Indeks Profesioanlisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

Aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 memiliki target pada Revisi I Perjanjian Kinerja sebesar 89%. Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 sebesar 72,39%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.11 Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan Teknis Transportasi Darat.



Gambar 2.11 Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dimana sebagian besar tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut tertuang dalam rincian kertas kerja (POK) yaitu kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat.

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja Target kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sesuai target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 89%. Tata cara perhitungan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan cara sebagai berikut:
 1. Aspek perencanaan
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) (10%)
 - b. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) (5%)
 - c. Pengisian input e-planning (5%)
 - d. Pengisian input e-performance (5%)
 2. Aspek kepegawaian (SDM)
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks Profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek:
 - a. Kualifikasi (pendidikan formal terakhir) (6%)
 - b. Kompetensi (10%)
 - c. Kinerja (8%)
 - d. Disiplin (1%)
 3. Aspek Keuangan
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja (25%).
 4. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)
Aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran (25%).
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Kegiatan perencanaan dan pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu karena adanya koordinasi yang baik antar Seksi dan Sub Bagian;
 2. Telah mengajukan permohonan mengikuti diklat secara berkala untuk memenuhi kebutuhan kompetensi SDM;
 3. Anggaran belanja pegawai tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran, sehingga hak pegawai tetap dapat dibayarkan tepat waktu.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:
 1. Jumlah SDM dengan kompetensi PPNS pada satuan pelayanan masih kurang, sehingga ada beberapa jadwal kerja shift/ regu tanpa SDM dengan kompetensi PPNS yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya rampcheck pada jadwal kerja tersebut;
 2. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdampak pada sebagian besar kegiatan belum bisa dilaksanakan;
 3. Beberapa SDM yang telah mengikuti diklat PPNS sampai saat ini belum mendapatkan undangan pelantikan, sehingga belum memiliki Kartu Tanda PPNS dan SKEP yang mengakibatkan secara legalitas belum bisa melaksanakan tugas sebagai PPNS.
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan penjumlahan prosentase dari Aspek perencanaan, Aspek kepegawaian, Aspek keuangan dan Aspek penyelenggaraan perkantoran di mana masing – masing aspek memiliki bobot 25%. Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Tahun 2025 sebesar 72,39%.

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Jika dibandingkan dengan target pada Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 89% maka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 81,34%. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{72,39}{89} \times 100\% = 81,34\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 9.411.280.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Rp. 274.252.800,- atau mencapai 2,91%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengevaluasi kebutuhan kualifikasi SDM agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat sesuai ketentuan;
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam Rincian Kertas Kerja (POK);
3. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar kegiatan segera bisa dilaksanakan.

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah menggunakan 1 (Satu) IKK sebagaimana pada tabel 2.23 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Akuntabel.

Tabel 2.23 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TW I
SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	%	90	
		Target		90
		Realisasi		88,51
		Capaian		98,34

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Tabel 2.24 Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Satuan : %
Target/ Realisasi/ Capaian		TW I
Target		90
Realisasi		88,51
Capaian		98,34

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

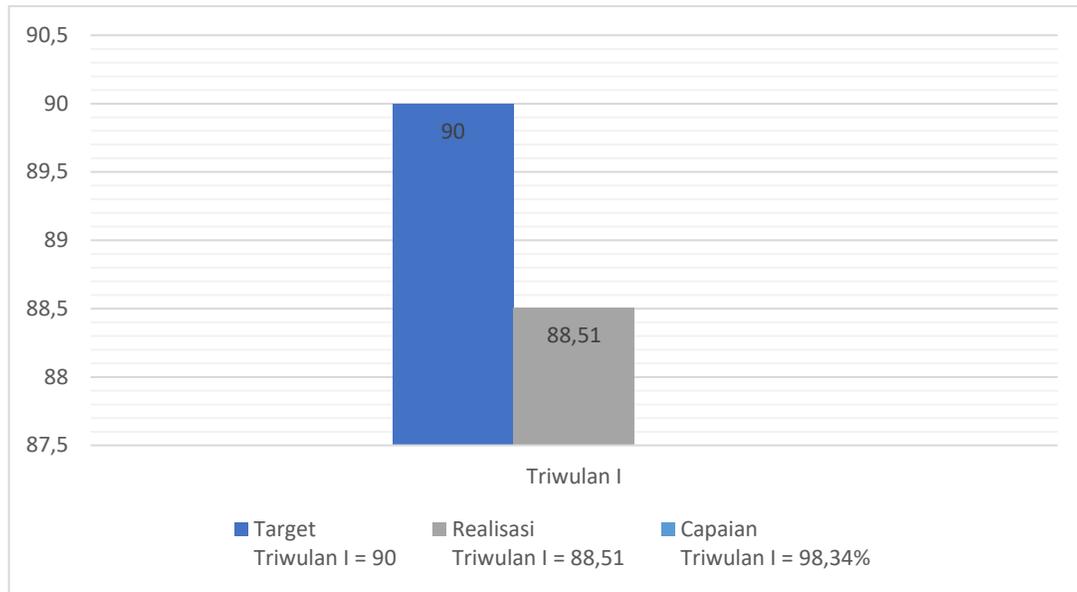
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan tingkat penyelenggaraan perkantoran untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas I Jawa Tengah.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 88,51. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 90 maka capaian kerjanya 98,34%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar

2.12 Grafik Capaian IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar 2.12 Grafik Capaian IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Brokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dimana sebagian besar tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat tertuang dalam rincian kertas kerja (POK) yaitu kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat.

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja Target kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sesuai target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 90%. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas I Jawa Tengah.
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:
 1. Pemeliharaan Gedung Kantor BPTD Kelas I Jawa Tengah telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor baru BPTD Kelas I Jawa Tengah setelah berpindah dari Terminal tipe A Tirtonadi Kota Surakarta menuju Terminal Tipe Mangkang Kota Semarang;
 2. Adanya dukungan dari pimpinan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen yang ada di lingkungan BPTD Kelas I Jawa Tengah;
 3. Jumlah ketersediaan meja, kursi dan fasilitas internet telah memadai untuk mendukung kegiatan perkantoran setiap pegawai.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:
 1. Masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun karena adanya efisiensi anggaran;
 2. Kurangnya jumlah komputer, laptop ataupun printer dikarenakan anggaran yang tersedia untuk pengadaan masih kurang sedangkan komputer, laptop ataupun printer yang ada, beberapa masih mengalami kerusakan;

3. Koneksi internet pada lokasi kantor yang baru beberapa kali masih mengalami kendala yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan perkantoran.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2025 sebesar 88,51%.
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
Pada Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 memiliki target sebesar 90%. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{88,51}{90} \times 100\% = 98,34\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp 86.300.783.000- dengan realisasi tahun 2025 Rp 20.573.339.045,- atau mencapai 23,84%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar kegiatan segera bisa dilaksanakan;
2. Menginventarisir kebutuhan minimal masing – masing seksi dan subbag untuk untuk memenuhi kebutuhan setelah adanya perubahan menjadi BPTD Kelas I;
3. Mengajukan penghapusan barang komputer dan printer yang rusak parah dan sudah tidak layak lagi kemudian mengajukan permohonan pengadaan

komputer dan printer untuk mengganti komputer dan printer yang rusak tersebut.

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1 Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 183.288.242.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a.1 Rincian per Sumber Dana Tahun 2025:

Tabel 2.25 Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp. 165.722.012.000	90,42%
PNBP	Rp. 17.566.230.000	9,58%
Total	Rp. 183.288.242.000	100,00%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.2 Rincian per Jenis Belanja Tahun 2025:

Tabel 2.26 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp. 62.146.568.000	33,91%
Belanja Barang	Rp. 78.339.033.000	42,74%
Belanja Modal	Rp. 42.802.641.000	23,35%
Total	Rp. 183.288.242.000	100,00%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Meskipun Pagu pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah terdapat 2 (dua) kali revisi dan mengalami pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 namun dengan nilai pagu tidak berubah sebesar Rp. 183.288.242.000,-.

Pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Kementerian Keuangan Tanggal 02 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403869/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah (Dipa Awal).
- b. Surat Kementerian Keuangan Tanggal 22 Februari 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403869/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah (Revisi I).
- c. Surat Kementerian Keuangan Tanggal 24 Maret 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403869/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah (Revisi II).

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berdasarkan Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah telah mengalami pergeseran anggaran sampai revisi ke-2 pada tanggal 24 Maret 2025 namun tidak mengalami perubahan pagu sebesar Rp. 183.288.242.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian per Sumber Dana:

Tabel 2.27 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

RM	Rp. 165.722.012.000	90,42 %
PNBP	Rp. 17.566.230.000	9,58 %
Total	Rp. 183.288.242.000	100,00 %

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

- Rincian per Jenis Belanja:

Tabel 2.28 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp. 62.146.568.000	33,91 %
Belanja Barang	Rp. 78.889.033.000	43,04 %
Belanja Modal	Rp. 42.252.641.000	23,05 %
Total	Rp. 183.288.242.000	100,00%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.3.1.2 Refocussing Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah tidak mengalami perubahan pagu.

- a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah

Tabel 2.29 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

DIPA	SUMBER DANA (Rp)		JUMLAH
	RM	PNBP	
PAGU AWAL	165.722.012.000	17.566.230.000	183.288.242.000
REVISI KE-1	165.722.012.000	17.566.230.000	183.288.242.000
REVISI KE-2	165.722.012.000	17.566.230.000	183.288.242.000

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

- a.2. Rincian Revisi per Jenis Belanja

Tabel 2.30 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

DIPA	JENIS BELANJA (Rp)			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	62.146.568.000	78.339.033.000	42.802.641.000	183.288.242.000
REVISI KE-1	62.146.568.000	78.339.033.000	42.802.641.000	183.288.242.000
REVISI KE-2	62.146.568.000	78.889.033.000	42.252.641.000	183.288.242.000

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

Tabel 2.31 Rincian Revisi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	62.146.568.000	-	62.146.568.000
Belanja Barang	78.339.033.000	550.000.000	78.889.033.000
Belanja Modal	42.802.641.000	-550.000.000	42.252.641.000
TOTAL	183.288.242.000	0	183.288.242.000
· RM	165.722.012.000	-	165.722.012.000
· PNBP	17.566.230.000	-	17.566.230.000
TOTAL	183.288.242.000	0	183.288.242.000

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan I 2025 terjadi beberapa realokasi anggaran. Realokasi anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran agar kegiatan tugas pokok dan fungsi bisa dilaksanakan dengan baik.

Jika dilihat dari jenis belanja, pagu belanja barang terdapat penambahan anggaran senilai Rp 550.000.000,- dari pagu awal Rp 78.339.033.000,- menjadi Rp 78.889.033.000,-. Untuk pagu belanja modal di mana pagu awal Rp 42.802.641.000,- mengalami pengurangan senilai Rp 550.000.000,- menjadi Rp 42.252.641.000,-.

Jika dilihat dari sumber dana, baik pada sumber dana Rupiah Murni (RM) maupun pada sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak mengalami perubahan anggaran.

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran program dan kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel 2.32 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Ditjen Perhubungan Darat	183.288.242.000	-	183.288.242.000
Program Infrastruktur Konektivitas	96.987.459.000	-	96.987.459.000
4637. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4.370.370.000	-	4.370.370.000
4638. Pelayanan Transportasi Darat	51.524.030.000	587.031.000	52.111.061.000
4639. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	32.031.779.000	-937.031.000	31.094.748.000
4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat	9.061.280.000	350.000.000	9.411.280.000
Program Dukungan Manajemen	86.300.783.000	-	86.300.783.000
4670. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	24.154.215.000	-	24.154.215.000
4670. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	62.146.568.000	-	62.146.568.000

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2025

Tahun 2021 merupakan masa peralihan dari KPPN Semarang menuju KPPN Surakarta, sehingga BPTD Kelas I Jawa Tengah memiliki 2 (dua) DIPA dalam masa transisi di tahun tersebut yaitu Semarang dan Surakarta. Adapun data perbandingan pagu dan realisasi tahun 2020 – 2025 ada pada tabel 2.33 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2025.

Tabel 2.33 Rincian Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	229.400.938.000	291.717.039.000	283.111.395.337	97,05%
2	2021 Semarang	299.975.264.000	32.132.507.000	32.046.427.110	99,73%
3	2021 Surakarta	176.976.830.000	232.034.052.000	219.199.071.349	94,47%
4	2022	288.061.712.000	267.041.946.000	266.278.481.726	99,71%
5	2023	304.784.179.000	300.234.819.000	298.642.812.581	99,47%

6	2024	292.199.607.000	301.180.286.000	290.439.646.351	96,43%
7	2025	183.288.242.000	183.288.242.000	28.532.686.083	15.57 %

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2024 anggaran yang terserap sebesar Rp 290.439.646.351,- atau mencapai 96,43% dari pagu akhir Rp 301.180.286.000,- sedangkan pada tahun 2025 dikarenakan masih pada triwulan I maka tingkat penyerapan anggaran sebesar Rp 28.532.686.083,- atau baru mencapai 15,57 % dari pagu per triwulan I Rp 183.288.242.000,-.

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34 Rincian Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	TRIWULAN I		
		PAGU	REALISASI (Rp)	%
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4.370.370.000	4.370.370.000	-	0%
4638 Pelayanan Transportasi Darat	51.524.030.000	52.111.061.000	6.926.731.243	13.29%
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	32.031.779.000	31.094.748.000	758.362.995	2.44%
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	9.061.280.000	9.411.280.000	274.252.800	2.91%
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	24.154.215.000	24.154.215.000	1.730.417.734	7.16%
4671 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	62.146.568.000	62.146.568.000	18.842.921.311	30.32%
	183.288.242.000	183.288.242.000	28.532.686.083	15.57%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 28.532.686.083,- atau mencapai 15,57% dari total pagu sebesar Rp. 183.288.242.000,-.

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 28.532.686.083,- atau mencapai 15,57% dari total pagu sebesar Rp. 183.288.242.000,-. Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah dianalisis pada triwulan I untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35 Rincian Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	62.146.568.000	18.842.541.887	30.32%
2	Belanja Barang	78.889.033.000	9.639.974.772	12.22%
3	Belanja Modal	42.252.641.000	49.790.000	0.12%
TOTAL		183.288.242.000	28.532.306.659	15.57%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel 2.36 Rincian Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	165.722.012.000	28.532.306.659	17.22%
2	PNBP	17.566.230.000	0	0.00 %
TOTAL		183.288.242.000	28.532.306.659	15.57%

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan menurut penggunaan sumber daya berdasarkan program sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sesuai pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		Triwulan I		
		Capaian Rata- Rata Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (Posisi TW I) (%)
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	52,53	0	52,23
SK 2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	33,33	3,78	29,55
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	73,06	0,41	72,65
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	81,34	0,15	81,19
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	98,34	11,22	87,12
TOTAL		67,72	15,57	52,15

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 67,72% dengan realisasi anggaran sebesar 15,57% menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 52,15%.

II.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.38 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM

NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	KEPALA BALAI	Kepala Balai	1	1				ESSELON II DAN III		
2	BAGIAN TATA USAHA	Kepala Bagian Tata Usaha	1	1						
3	BIDANG PRASARANA	Kepala Bidang Prasarana	1	1						
4	BIDANG SARANA DAN ANGKUTAN	Kepala Bidang Sarana dan Angkutan	1	1						
5	BIDANG LALU LINTAS DAN PENGAWASAN	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan	1	1						
JUMLAH					5	0	0	5		
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
1	2	3	4	5	6	7				8
1	SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM	1	Kepala Subbagian Sumber Daya SDM dan Umum		1				BAGIAN TATA USAHA	
		2	Analisis Hukum Ahli Pertama							
		3	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama							
		4	Arsiparis Penyelia							
		5	Arsiparis Mahir							
		6	Arsiparis Terampil							

7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama						
8	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia						
9	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan						
10	Pranata Hubungan Masyarakat Lanjutan / Terampil						
11	Pranata SDM Aparatur Penyelia						
12	Pranata SDM Aparatur Mahir						
13	Pranata SDM Aparatur Terampil						
14	Penelaah Teknis Kebijakan		8				
15	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				6		
16	Pengolah Data dan Informasi						
17	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1		
18	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				10		
19	Pengelola Umum Operasional (pppk sd/sltp)				1		

JUMLAH				9	0	18		27		
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
1	2	3	4	PNS	PPPK	PPNPN	8	9	10	
2	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		1			BAGIAN TATA USAHA		
		2	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama							
		3	Penata laksana Barang Mahir							
		4	Perencana Ahli Pertama							
		5	Pranata Keuangan APBN Mahir							
		6	Pranata Keuangan APBN Terampil							
		7	Penelaah Teknis Kebijakan		10					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				8			
		9	Pengolah Data dan Informasi							
		10	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1			
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)							
JUMLAH					11	0	9		20	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	SEKSI PRASARANA JALAN	1	Kepala Seksi Prasarana Jalan		1				BAGIAN PRASARANA	
		2	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama							
		3	Penelaah Teknis Kebijakan		2					
		4	Pengawas Transportasi Darat							
		5	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				4			
		6	Pengolah Data dan Informasi							
		7	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)					1		
		8	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1		
JUMLAH					3	0	6		9	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	SEKSI PRASARANA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	1	Kepala Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan		1				BAGIAN PRASARANA	
		2	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama							

		3	Penelaah Teknis Kebijakan							
		4	Pengawas Transportasi Darat		5					
		5	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				2			
		6	Pengolah Data dan Informasi		1					
		7	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		8	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				1			
JUMLAH					7	0	3		10	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	SEKSI SARANA JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	1	Kepala Seksi Sarana Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan		1					BIDANG SARANA DAN ANGKUTAN
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir / Pelaksana Lanjutan							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil / Pelaksana			5				
		5	Pranata Komputer Penyelia							

		6	Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan							
		7	Pranata Komputer Terampil / Pelaksana							
		8	Ahli Ukur Kapal							
		9	Penilik Kelaiklautan Kapal							
		10	Penelaah Teknis Kebijakan							
		11	Pengawas Transportasi Darat		3					
		12	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				2			
		13	Pengolah Data dan Informasi							
		14	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		15	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)							
JUMLAH					4	5	2		11	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	SEKSI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	1	Kepala Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		1				BIDANG SARANA DAN ANGKUTAN	
		2	Pranata Komputer Penyelia							

		3	Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan								
		4	Pranata Komputer Terampil / Pelaksana								
		5	Penelaah Teknis Kebijakan								
		6	Pengawas Transportasi Darat		3						
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)								
		8	Pengolah Data dan Informasi		4						
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1				
		10	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)								
JUMLAH					8	0	1		9		
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI		
				PNS	PPPK	PPNPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	SEKSI LALU LINTAS, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	1	Kepala Seksi Lalu Lintas, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan		1			BIDANG LALU LINTAS DAN PENGAWASAN			
		2	Penelaah Teknis Kebijakan		2						
		3	Pengawas Transportasi Darat		2						

		4	Petugas Lalu Lintas Angkutan Transportasi		1						
		5	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				3				
		6	Pengolah Data dan Informasi		0						
		7	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1				
JUMLAH					6	0	4		10		
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
					PNS	PPPK	PPNPN				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
8	SEKSI PENGAWASAN	1	Kepala Seksi Pengawasan		1					BIDANG LALU LINTAS DAN PENGAWASAN	
		2	Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi								
		3	Pengawas Transportasi Darat		5						
		4	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				1				
		5	Pengolah Data dan Informasi								
		6	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)					2			
		7	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1			
JUMLAH					6	0	4		10		

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pelabuhan Penyebrangan	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Penyeberangan Kendal	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		1					
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				3			
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat							
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)							
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					2	0	3		5	

NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
				PNS	PPPK	PPNPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pelabuhan Penyebrangan	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1			Pelabuhan Penyeberangan Jepara	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		1				
		3	Petugas Telkompel						
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi						
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		1				
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan						
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				1		
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1		
		9	Petugas Transportasi Darat		1				
		10	Pengolah Data dan Informasi						
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)						
		12	Pengelola Umum Operasional						
JUMLAH				4	0	2		6	

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pelabuhan Sungai	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Sungai Sleko Cilacap	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayanan							
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)					1		
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat			1				
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)							
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					2	0	1		3	

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pelabuhan Sungai	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Sungai Jipang	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran							
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				2			
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat							
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)							
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					1	0	2		3	

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
9	Pelabuhan Danau	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Danau Cacaban	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayanan							
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)					1		
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)					1		
		9	Petugas Transportasi Darat							
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1		
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					1	0	3		4	

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pelabuhan Danau	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Danau Gajah Mungkur	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		1					
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat							
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1		
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					2	0	1		3	

NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Pelabuhan Danau	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Danau Rawa Pening	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran							
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat			1				
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1		
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				2	0	1		3		

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pelabuhan Danau	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Danau Kedung Ombo	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran							
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)					1		
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat							
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1		
		12	Pengelola Umum Operasional							
					1	0	2		3	

NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pelabuhan Danau	1	Pengawas Satuan Pelayanan		1				Pelabuhan Danau Wadas Lintang	
		2	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		1					
		3	Petugas Telkompel							
		4	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		5	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		6	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan							
		7	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		8	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		9	Petugas Transportasi Darat							
		10	Pengolah Data dan Informasi							
		11	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)					1		
		12	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					2	0	1		3	

NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
				PNS	PPPK	PPNPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Terminal Penumpang Tipe A Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1			Terminal Tipe A Bulupitu	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		2	2			
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula						
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		11				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		4				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				5		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				2		
		10	Petugas Transportasi Darat		3				
		11	Pengolah Data dan Informasi		4				

		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				32			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	25	2	39		66	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Ir Soekarno	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil							
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			2				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		15					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		4					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				15			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				8			

		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi		1					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (ppk sma)				27			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	21	2	50		73	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
17	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Giri Adipura	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	2				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		1					
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		10					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		7					

		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				17				
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				3				
		10	Petugas Transportasi Darat								
		11	Pengolah Data dan Informasi		1						
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				13				
		13	Pengelola Umum Operasional								
JUMLAH				1	21	2	33		56		
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI		
				PNS	PPPK	PPNPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Tidar		
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia								
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir								
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		2	2					
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			1					

		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		7					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		2					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				4			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1			
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi		2					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (ppk sma)				21			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	14	3	26		43	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Mangkang	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							

		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil							
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		1	2				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		8					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		4					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)			1	7			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				4			
		10	Petugas Transportasi Darat		1					
		11	Pengolah Data dan Informasi		1					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				21			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	16	3	32		51	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
20	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Bawen	

		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil						
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			3			
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		11				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		3				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				7		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1		
		10	Petugas Transportasi Darat						
		11	Pengolah Data dan Informasi		1				
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				13		
		13	Pengelola Umum Operasional						
JUMLAH				1	16	3	21		40
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI

1	2	3	4	PNS	PPPK	PPNPN	8	9	10
21	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1			Terminal Tipe A Pekalongan	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	2			
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula						
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		7				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		3				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				3		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				2		
		10	Petugas Transportasi Darat						
		11	Pengolah Data dan Informasi		4				
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				11		

		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	16	2	16		34	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Kebumen	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil			1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			1				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			7				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)					10		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)					4		
		10	Petugas Transportasi Darat							

		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (ppk sma)				20			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	8	2	34		44	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Pemasang	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	2				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			16				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi			4				
		8	Penata Layanan Operasional (ppk S1)					11		

		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				0				
		10	Petugas Transportasi Darat								
		11	Pengolah Data dan Informasi								
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				31				
		13	Pengelola Umum Operasional								
JUMLAH				1	22	2	42		66		
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
					PNS	PPPK	PPNPN				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Bobotsari		
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia								
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir								
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	1					
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			1					
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			8					

		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		2					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				3			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1			
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi		4					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				14			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	16	2	18		36	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Mendolo	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1					

		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			1					
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		5						
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		1						
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				4				
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				2				
		10	Petugas Transportasi Darat								
		11	Pengolah Data dan Informasi		1						
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				14				
		13	Pengelola Umum Operasional								
JUMLAH				1	9	1	20		30		
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
					PNS	PPPK	PPNPN				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Terminal Penumpang Tipe A Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa		
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia								

		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil			1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		1	1				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		3					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		2					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				10			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				4			
		10	Petugas Transportasi Darat		1					
		11	Pengolah Data dan Informasi		1					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				9			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	9	2	23		34	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

27	Terminal Penumpang Tipe A Kelas III	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Purworejo
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		1				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		4				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		4				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				8		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				2		
		10	Petugas Transportasi Darat		2				
		11	Pengolah Data dan Informasi						
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				17		
		13	Pengelola Umum Operasional						

JUMLAH				1	13	0	27		40	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
28	Terminal Penumpang Tipe A Kelas III	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Jati Kudus	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil			1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			1				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		8					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		3					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				6			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				0			
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							

		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				10			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	12	2	16		30	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Terminal Penumpang Tipe A Kelas III	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Cepu	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		1					
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			11				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi			1				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)					3		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)					0		

		10	Petugas Transportasi Darat		1					
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (ppk sma)				8			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	16	1	11		28	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
30	Terminal Penumpang Tipe A Kelas III	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Tingkir	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			6				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi			3				

		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				7				
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				2				
		10	Petugas Transportasi Darat								
		11	Pengolah Data dan Informasi								
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				17				
		13	Pengelola Umum Operasional								
JUMLAH				1	11	1	26		38		
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI		
				PNS	PPPK	PPNPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31	Terminal Penumpang Tipe A Kelas III	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Tegal		
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia								
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir								
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil			4					
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula								

		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		4					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		2					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				12			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1			
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				25			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	7	4	38		49	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
32	Terminal Penumpang Tipe A Kelas III	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				Terminal Tipe A Demak	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							

		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		2	2				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		4					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		5					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				4			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				7			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	12	2	11		25	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
33	UPPKB Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				UPPKB Subah	

		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			1			
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		8				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		3				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				4		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)						
		10	Petugas Transportasi Darat						
		11	Pengolah Data dan Informasi						
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				4		
		13	Pengelola Umum Operasional						
JUMLAH				1	13	1	8		22
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING		KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI

1	2	3	4	PNS	PPPK	PPNPN	8	9	10
34	UPPKB Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1			UPPKB Banyudono	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		2	2			
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula						
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		4				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		7				
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				11		
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1		
		10	Petugas Transportasi Darat						
		11	Pengolah Data dan Informasi						
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				5		

		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	14	2	17		33	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	UPPKB Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				UPPKB Tanjung	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil			5				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		7					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		1					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				6			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				2			
		10	Petugas Transportasi Darat							

		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (ppk sma)				2			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	9	5	10		24	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
36	UPPKB Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				UPPKB Ajibarang	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	2				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			7				
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		8	Penata Layanan Operasional (ppk S1)					4		

		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1				
		10	Petugas Transportasi Darat								
		11	Pengolah Data dan Informasi		2						
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				9				
		13	Pengelola Umum Operasional								
JUMLAH				1	11	2	14		27		
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
					PNS	PPPK	PPNPN				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
37	UPPKB Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				UPPKB Sarang		
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia								
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir								
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	2					
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula								
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi			4					

		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		2					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				3			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				7			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	8	2	10		20	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	UPPKB Kelas I	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				UPPKB Klepu	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		4	1				

		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		5					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		3					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				2			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)				1			
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				7			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	13	1	10		24	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
39	UPPKB Kelas II	1	Pengawas Satuan Pelayanan	1	1				UPPKB Wanareja	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							

		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil		1	1				
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula			3				
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		5					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		1					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)				4			
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		10	Petugas Transportasi Darat		1					
		11	Pengolah Data dan Informasi		1					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				3			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH				1	10	4	7		21	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

40	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan					UPPKB Gubug
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia					
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir					
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil					
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula					
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi					
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi					
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)					
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)					
		10	Petugas Transportasi Darat					
		11	Pengolah Data dan Informasi					
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				1	
		13	Pengelola Umum Operasional					

JUMLAH				0	0	1		1	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
1	2	3	4	PNS	PPPK	PPNPN	8	9	10
41	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan					UPPKB Lebuawu	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil						
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula						
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi						
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi						
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)						
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)						
		10	Petugas Transportasi Darat						
		11	Pengolah Data dan Informasi						

		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				1			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					0	0	1		1	
NO	SEKSI	JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
				PNS	PPPK	PPNPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan						UPPKB Salam	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil							
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							

		10	Petugas Transportasi Darat								
		11	Pengolah Data dan Informasi								
		12	Pengadministrasi Perkantoran (ppk sma)				1				
		13	Pengelola Umum Operasional								
JUMLAH					0	0	1		1		
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI	
					PNS	PPPK	PPNPN				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
43	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan							UPPKB Pringsurat	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia								
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir								
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil								
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula								
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi								
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi								

		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				1			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					0	0	1		1	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
44	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan						UPPKB Selogiri	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							
		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil							
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							

		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				1			
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					0	0	1		1	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
45	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan						UPPKB Sambong	
		2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia							
		3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir							

		4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil							
		5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula							
		6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi							
		7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi							
		8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)							
		9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)							
		10	Petugas Transportasi Darat							
		11	Pengolah Data dan Informasi							
		12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)							
		13	Pengelola Umum Operasional							
JUMLAH					0	0	0		0	
NO	SEKSI		JABATAN	ABK	EKSISTING			KEBUTUHAN	PENEMPATAN	JUSTIFIKASI
					PNS	PPPK	PPNPN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
46	UPPKB Tidak Aktif	1	Pengawas Satuan Pelayanan						UPPKB Toyogo	

	2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia						
	3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir						
	4	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil						
	5	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula						
	6	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi						
	7	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi						
	8	Penata Layanan Operasional (pppk S1)						
	9	Pengelola Layanan Operasional (pppk D3)						
	10	Petugas Transportasi Darat						
	11	Pengolah Data dan Informasi						
	12	Pengadministrasi Perkantoran (pppk sma)				1		
	13	Pengelola Umum Operasional						
JUMLAH				0	0	1		1

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah

II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami beberapa hambatan ataupun kendala antara lain:

1. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tahun ini membuat banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, sehingga daya serap anggaran belum maksimal.
2. Masih kurangnya pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pemenuhan tugas dan fungsi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah.



BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan, dimana 4 (empat) indikator kinerja kegiatan capaian kerjanya lebih atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan capaian kerjanya kurang dari 100% ($IKK \leq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi 10,13% (target 100%);
 - b. IKK 1.3 Jumlah terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi 18 Lokasi (target 18 Lokasi);
 - c. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi 0 Lokasi (target 1 Lokasi);
 - d. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 9 Lokasi (target 9 Lokasi);
 - e. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A terealisasi 0% (target 55%);
 - f. IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal Tipe A terealisasi 55% (target 55%);
 - g. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi 0% (target 12%);
 - h. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 18,44% (target 19,17%);

- i. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 6,93% (target 9%);
 - j. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 Orang (target 250 Orang);
 - k. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat teralisasi dengan nilai 72,39 Nilai (target 89 nilai);
 - l. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi dengan nilai 88,51 nilai (target 90 nilai).
2. Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target Revisi I Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja BPTD Kelas I Jawa Tengah maka diperoleh data Capaian Kinerja pada Kelas I Jawa Tengah adalah sebesar **67,72%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh Sasaran Kegiatan;
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah telah mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran maupun penambahan anggaran agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera dilaksanakan;
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah akan meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggungjawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	10,13	10,13	Belum Tercapai	1. Menunggu hasil keputusan tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terkait; 3. Melakukan koordinasi dengan rapat bersama stakeholder.	Bidang Sarana dan Angkutan
			IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18	18	18	100%	Tercapai	1. Mengajukan permohonan anggaran peningkatan atau revitalisasi Terminal lainnya sesuai dengan kebutuhan agar Terminal dapat beroperasi dengan lebih optimal;	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
										2. Mengajukan tambahan anggaran operasional Terminal Tipe A agar tidak menghambat kegiatan operasional Terminal; 3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar terminal bayangan dapat segera ditertibkan, sehingga mendorong penumpang untuk naik maupun turun hanya di terminal.	
		IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	1	1	0	0	Belum Tercapai	1. Pengajuan usulan ulang anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda dan review desain dengan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Berkoordinasi dengan direktorat terkait agar anggaran pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda dapat segera digunakan kembali; 3. Segera koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membuat penyesuaian rencana pelaksanaan.	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	9	9	100%	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan kebutuhan Diklat agar jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai Syahbandar Pembantu dapat bertambah untuk memenuhi kebutuhan pada setiap Pelabuhan SDP; 2. Menambah jumlah SDM di setiap satuan pelayanan Pelabuhan SDP agar pengawasan bisa dilaksanakan lebih baik lagi; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pengelola Pelabuhan maupun paguyuban setempat agar Pelabuhan SDP dapat beroperasi dengan optimal. 	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A	%	55	55	0	0%	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan penambahan anggaran perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan penilaian SPM Terminal Tipe A; 2. Koordinasi dengan Terminal Tipe A yang ada di Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan SPM pada Terminal Tipe A; 3. Menghimbau kepada Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A agar mengusulkan perbaikan atau peningkatan fasilitas-fasilitas terminal yang masih belum sesuai dengan SPM. 	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal Tipe A	%	55	55	55	100%	Tercapai	<p>1. Perlu adanya sistem yang terintegrasi pada seluruh terminal tipe A yang ada di Jawa Tengah mengenai informasi tentang Jadwal Keberangkatan, Kedatangan, dan Bus apa saja yang masuk dan keluar terminal serta tracking Bus yang dalam perjalanan serta terhubung ke aplikasi Kementerian Perhubungan seperti Mitra Darat agar penumpang dapat mengetahui bus sedang berada dimana dan kapan perkiraan waktu tiba di terminal;</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan Terminal Tipe A berbasis Teknologi, misalnya penjualan tiket bus secara online, sistem tiket elektronik atau e-ticketing serta sistem informasi berbasis elektronik yang <i>realtime</i></p> <p>3. Meningkatkan pelayanan terminal berbasis teknologi yang terintegrasi, yaitu</p>	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
											menggunakan MitraDarat serta Terminal Online System (TOS), vending machine, pintu otomatis penumpang, Pintu Gerbang Otomatis Kendaraan, dan Tampilan Informasi Digital agar dikembangkan lagi supaya data produksi terminal secara otomatis terekam dalam database; 4. Mengajukan pembukaan blokir anggaran kegiatan pendukung Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A agar kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan.	

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12	12	0	0%	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan penambahan anggaran perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan penilaian SPM Pelabuhan SDP; Berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan dan Dinas Perhubungan terkait agar dapat memenuhi jenis pelayanan yang belum tersedia pada pelabuhan penyeberangan yang sekiranya dapat terpenuhi agar pemenuhan indikator SPM dapat terpenuhi; Memberikan kuesioner yang berisi survey kepuasan pelayanan penumpang yang terdapat pada pelabuhan untuk evaluasi peningkatan SPM. 	Bidang Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17	19,17	18,44	96,19%	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan pembukaan blokir anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan jalan; Membuat schedule (rencana) untuk pemasangan 	Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
											<p>perlengkapan jalan agar selesai tepat waktu;</p> <p>3. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk mengetahui prioritas pekerjaan yang akan didahulukan</p>	
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9	9	6,93	123,02 %	Tercapai	<p>1. Meningkatkan pengawasan jumlah kendaraan masuk UPPKB dan jumlah kendaraan melanggar melalui aplikasi JTO dan laporan bulanan;</p> <p>2. Mengajukan permohonan perbaikan Sarana dan Prasarana UPPKB;</p> <p>3. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada para pemilik kendaraan yang wajib masuk UPPKB tentang tertib administrasi.</p>	Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250	250	0	0%	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar bisa segera melaksanakan kegiatan tersebut; 2. Secara berkala melakukan sosialisasi dengan menggunakan beberapa media sosial agar banyak masyarakat yang mengetahui dan harapannya dapat semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan transportasi jalan; 3. Menyesuaikan rencana jadwal pelaksanaan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran agar tetap bisa dilaksanakan di waktu yang ideal. 	Bidang Sarana dan Angkutan
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89	89	72,39	81,34%	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebutuhan kualifikasi SDM agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat sesuai ketentuan; 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam Rincian Kertas Kerja (POK); 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan • Bidang Sarana dan Angkutan • Bidang Prasarana • Bagian Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM REVISI PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
											3. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar kegiatan segera bisa dilaksanakan.	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	88,51	98,34%	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar kegiatan segera bisa dilaksanakan; 2. Menginventarisir kebutuhan minimal masing – masing seksi dan subbag untuk untuk memenuhi kebutuhan setelah adanya perubahan menjadi BPTD Kelas I; 3. Mengajukan penghapusan barang komputer dan printer yang rusak parah dan sudah tidak layak lagi kemudian mengajukan permohonan pengadaan komputer dan printer untuk mengganti komputer dan printer yang rusak tersebut. 	Bagian Tata Usaha

Sumber: Data diolah oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	55
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	91
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Surakarta, 01 Desember 2024

Kepala Balai,



ARDONO ATD, MT
NIP. 196711121991031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardono, ATD., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Surakarta, 6 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Tengah

Ardono, A.T.D., M.T.
NIP. 19671112 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	55
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

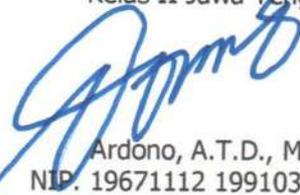
Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 4.370.370.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 51.524.030.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 32.031.779.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 9.061.280.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 24.154.215.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 62.146.568.000

Disetujui
Plt .Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Surakarta, 6 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Tengah



Ardono, A.T.D., M.T.
NIP. 19671112 199103 1 002

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	SK.1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Angkutan Perintis Teluk Penyu - Nusa Wungu	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	1.370.370.000	Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18		17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18		Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
		IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda BRT Trans Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.000.000.000	Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	55	Excellent Service Terminal Operasional Terminal Penumpang Tipe A	0	0	9	15	20	27	35	42	47	50	55	55	34.876.230.000	Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Pengadaan Perangkat Smart Jembatan Timbang Online (JTO) - Klepu Pengadaan Perangkat Smart Terminal Bulupitu Purwokerto Pengadaan Perangkat Smart Terminal Tirtonadi Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	14.000.000.000	Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2.647.800.000	Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,73	18,73	18,85	18,85	19,03	19,11	19,17	21.228.551.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	9	Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Operasional UPPKB	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10.446.085.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250	Pekan Keselamatan Jalan Sosialisasi Sadar Lalu lintas Usia Dini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	357.143.000	Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	67.00	69.00	71.00	73.00	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	86.00	87.00	89.00	9,061,280,000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan - Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan - Seksi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan - Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat, Pembangunan Gedung Pelayanan Transportasi Darat di TTA Mangkang	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	86,300,783,000	Subbagian Tata Usaha

Surakarta, 6 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas
II Jawa Tengah



ARDONO, ATD, MT
NIP. 196711121991031002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardono, ATD., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Semarang, 15 Januari 2025
Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Tengah

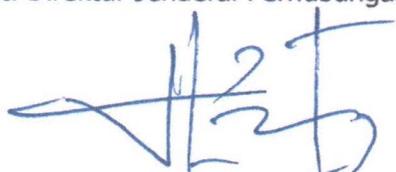
Ardono, A.T.D., M.T.
NIP. 19671112 199103 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS I JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	55
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

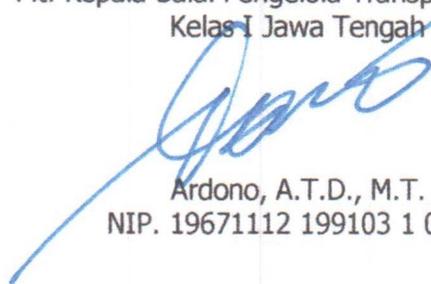
Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 4.370.370.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 51.524.030.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 32.031.779.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 9.061.280.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 24.154.215.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 62.146.568.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Semarang, 17 Januari 2025
Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Tengah



Ardono, A.T.D., M.T.
NIP. 19671112 199103 1 002

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat tanggal 7 Januari 2025 dan adanya penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Balai Kelas I Jawa Tengah sesuai Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas nomor: ST-DJPD 12 Tahun 2025 tanggal 07 Januari 2025, maka perlu dilakukan Revisi I Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah membutuhkan anggaran sebesar Rp. 183.288.242.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) berdasarkan DIPA dan POK revisi ke-1 Pada tanggal 11 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

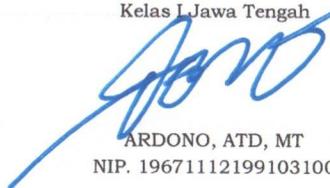
REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Angkutan Perintis Teluk Penyus - Nusa Wungu	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	1.370.370.000	Bidang Sarana dan Angkutan	
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	18		17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18		Bidang Prasarana
		IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda BRT Trans Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.000.000.000	Bidang Prasarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		Bidang Prasarana
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	55	Excellent Service Terminal Operasional Terminal Penumpang Tipe A	0	0	9	15	20	27	35	42	47	50	55	55	34.876.230.000	Bidang Prasarana	
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Pengadaan Perangkat Smart Jembatan Timbang Online (JTO) - Klepu Pengadaan Perangkat Smart Terminal Bulupitu Purwokerto Pengadaan Perangkat Smart Terminal Tirtonadi Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	14.000.000.000	Bidang Prasarana	
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	12	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2.647.800.000	Bidang Prasarana

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bin 1	Bin 2	Bin 3	Bin 4	Bin 5	Bin 6	Bin 7	Bin 8	Bin 9	Bin 10	Bin 11	Bin 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	19,17	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,73	18,73	18,85	18,85	19,03	19,11	19,17	21.228.551.000	Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	9	Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Operasional UPPKB	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10.446.085.000	Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	250	Pekan Keselamatan Jalan Sosialisasi Sadar Lalu lintas Usia Dini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	357.143.000	Bidang Sarana dan Angkutan
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	86,00	87,00	89,00	9.061.280.000	- Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan - Bidang Sarana dan Angkutan - Bidang Prasarana - Bagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat, Pembangunan Gedung Pelayanan Transportasi Darat di TTA Manokwari	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	86.300.783.000	Bagian Tata Usaha

Semarang, 15 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Tengah


ARDONO, ATD, MT
NIP. 196711121991031002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

JL. AHMAD YANI NO.262
(KOMPLEK TERMINAL TIRTONADI)
SURAKARTA, 57134

TELP : (0271) 7471392

FAX : (0271) 7471392

EMAIL : bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA TENGAH

NOMOR : SK - BPTDJATENG 07 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah tentang Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH TAHUN 2025
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah untuk menetapkan:
 - a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan

- Keempat : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
- Kelima : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Keenam : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA TENGAH



ARDONO, ATD., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711121991031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Bagian Perencanaan, Sesditjen Perhubungan Darat;
4. Kepala Subbag. Tata Usaha BPTD Kelas II Jawa Tengah.

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah
Nomor : SK-BPTDJATENG 07 TAHUN 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan nasional
DEFINISI			
<p>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan.</p> <p>Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberlanjutan dari penyelenggaraan layanan keperintisan angkutan jalan kepada masyarakat</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Angkutan Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun } (n)}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya 			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
DEFINISI			
<p>Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya: (1) Bandar Udara Komodo, (2) Bandar Udara Silangit, (3) Bandar Udara Internasional Kertajati, (4) Bandar Udara Lombok, (5) Bandar Udara NYIA, (6) Bandar Udara Adi Sutjipto, (7) Stasiun Tugu, (8) Pelabuhan Lembar, (9) Terminal Mandalika, dan (10) Pelabuhan Labuan Bajo.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Angkutan Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat 			
CARA MENGHITUNG			
<p><i>IKK1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda</i></p>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
DEFINISI			
<p>Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh BPTD sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan.</p> <p>Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat 			
CARA MENGHITUNG			
IKK 1.3= Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan intergasi moda
DEFINISI			
<p>Fasilitas Pendukung dan integrasi moda yang terbangun. Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.4 = \text{Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda}$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM**INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS****KEGIATAN****INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT****SASARAN KEGIATAN****INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi
-----	---	---------	--------------------------------------

DEFINISI

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.

SUMBER DATA

- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Balai Pengelola Transportasi Darat

CARA MENGHITUNG

IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

SATUAN

Lokasi

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

PROGRAM**INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS****KEGIATAN****PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT****SASARAN KEGIATAN****INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A
-----	---	---------	---

DEFINISI

Persentase Standar Pelayanan (SP) di Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang yang terpenuhi adalah rata-rata dari persentase pemenuhan SP pada Terminal Penumpang Tipe A ditambah dengan rata-rata dari persentase pemenuhan SP pada terminal barang yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup :

Jenis Pemeriksaan	Uraian
SPM Pelayanan Penumpang	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Keandalan / Keteraturan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesetaraan

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.

SUMBER DATA

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat

CARA MENGHITUNG

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

SATUAN

% (Persentase)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

PROGRAM																								
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																								
KEGIATAN																								
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT																								
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN																						
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A																					
DEFINISI																								
<p>Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display.</p>																								
SUMBER DATA																								
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat 																								
CARA MENGHITUNG																								
$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$																								
$\text{IKK 2.2} = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$																								
<p>Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART_{TN}):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ASPEK PENILAIAN</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Vending Machine</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>passenger barrier gate</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>vehicle barrier gate</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CCTV</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>counting passenger</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>information display</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>				NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT	1	Vending Machine	20%	2	passenger barrier gate	20%	3	vehicle barrier gate	20%	4	CCTV	10%	5	counting passenger	10%	6	information display	20%
NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT																						
1	Vending Machine	20%																						
2	passenger barrier gate	20%																						
3	vehicle barrier gate	20%																						
4	CCTV	10%																						
5	counting passenger	10%																						
6	information display	20%																						
SATUAN																								
% (Persentase)																								
PENANGGUNG JAWAB																								
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah																								

PROGRAM**INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS****KEGIATAN****PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT****SASARAN KEGIATAN****INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
-----	---	---------	---

DEFINISI

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

SUMBER DATA

- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Balai Pengelola Transportasi Darat

CARA MENGHITUNG

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

SATUAN

% (Persentase)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
DEFINISI			
<p>Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.</p> <p>Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat Penerangan Jalan; 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system; 3) Marka Jalan; 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 5) Paku Jalan; 6) Rambu Lalu Lintas; 7) Rambu Tiang Gawang; 8) Rambu Tiang F; 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan; 10) Pagar Pengaman Jalan; <p>Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$			
SATUAN			
% (Persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
<p>Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO (Jembatan Timbang Online). Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Sarana Transportasi Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$			
SATUAN			
% (Persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional
DEFINISI			
<p>Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.</p> <p>Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.</p> <p>Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah.</p> <p>Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Sarana Transportasi Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK3.3 = \text{Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s. d tahun } (n)$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.4	Jumlah ketersediaan Taman Edukatif
<p style="text-align: center;">DEFINISI</p> <p>Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk miniature prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau yang dilengkapi dengan ruang display fasilitas dan tata cara lalu lintas jalan, kereta api dan angkutan sungai danau</p> <p>Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.</p>			
<p style="text-align: center;">SUMBER DATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat • Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 			
<p style="text-align: center;">CARA MENGHITUNG</p> <p style="text-align: center;"><i>IKK3.3 = Jumlah kumulatif taman edukasi yang sudah terbangun s. d tahun (n)</i></p>			
<p style="text-align: center;">SATUAN</p> <p>Lokasi</p>			
<p style="text-align: center;">PENANGGUNG JAWAB</p> <p>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah</p>			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI			
<p>Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b “Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.</p> <p>Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).</p> <p>Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat • Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK4.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP
DEFINISI			
<p>Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.</p> <p>Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dihitung berdasarkan Jumlah Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang terpasang pada tahun tersebut.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat 			
CARA MENGHITUNG			
$IKK4.7 = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
DEFINISI			
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:			
a) Aspek Perencanaan;			
b) Aspek Kepgawaian (SDM);			
c) Aspek Keuangan;			
d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)			
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.			
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.			
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelola Transportasi Darat Sub Bagian Tata Usaha 			
CARA MENGHITUNG			
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja	5%	
3	pengisian input e-planning	5%	
4	pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	
SATUAN			
Nilai			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah			

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
<p>1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah pada tahun 2023.</p> <p>2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.</p>			
SUMBER DATA			
<ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelola Transportasi Darat. 			
CARA MENGHITUNG			
<p>1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</p> <p>2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.</p> <p>3. Bobot:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%); Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%). 			
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	
Cara Perhitungan:			
A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;			
B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;			

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata-rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

***) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah